

MEWASPADAI POLARISASI ANCAMAN SUBVERSI TERHADAP NILAI KETAHANAN NASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

1. **Umum.** Perjalanan sejarah suatu bangsa dan negara akan senantiasa berubah-ubah mengikuti dinamika perkembangan global. Pernyataan tersebut dianalogkan bahwa pada tingkat kepentingan tertentu suatu negara manapun didunia ini, sejatinya akan berkembang sesuai dengan dinamika politik suatu negara tersebut yang dipresentasikan melalui penerapan hubungan internasionalnya. Oleh karenanya setiap negara dalam pergaulan internasional secara eksplisit sudah barang tentu akan tetap berupaya mempertahankan eksistensi dan kedaulatan sebagai manifestasi agar tetap survive dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Oleh sebab itu ketika kepentingan nasional suatu negara dibutuhkan maka realitasnya adalah dengan menjalin dan menjaga hubungan internasional, regional maupun multilateral yang saling menguntungkan dengan negara lainnya. Namun sebaliknya ketika kepentingan nasionalnya terganggu dan membutuhkan upaya recovery yang instant maka dapat saja terjadi bentuk pemaksaan kehendak yang dapat berdampak kepada ketidak harmonisan hubungan internasional

dan kemudian menimbulkan suatu ketegangan yang pada gilirannya dapat mengantarkan kepada konflik antar negara.

Bukti bahwa fenomena ketegangan hubungan antar negara sudah ada semenjak kehidupan peradaban manusia kuno sampai dengan peradaban modern saat ini yaitu tidak lepas dari saling bersitegang dan menyerang serta berkeinginan untuk menguasai sebagian atau seluruh bagian suatu negara baik dalam bentuk fisik maupun non fisik sebagaimana yang terwujud pada Perang Dunia I dan II, serta adanya sistem Blok dalam pakta pertahanan maupun entitas pembinaan keamanan kawasan, termasuk pula membentuk Group kawasan dalam kerjasama ekonomi yang kesemuanya bertujuan untuk membentengi diri dari berbagai tindakan negatif negara luar terhadap existensi dan kedaulatan negara. Pada kondisi seperti itu tentunya upaya untuk memenuhi kepentingan nasional suatu negara bila tidak terpenuhi secara lazim bisa saja akan menggunakan cara-cara lain diluar kepatutan pergaulan international. Suka tidak suka atau mau tidak mau disinilah teori **Subversive** akan muncul secara alami seiring dengan tuntutan hidup bangsa-bangsa itu sendiri yang harus dilaksanakannya sehingga akan sangat besar berpengaruh terhadap dinamika dan harmonisasi hubungan internasional. Implementasinya dapat dipastikan akan memunculkan filling gap terhadap segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dalih untuk memenuhi kepentingan yang lebih luas dalam hal ini kepentingan pada tataran Internasional.

Mewaspadaai indikator terjadinya subversi maka bagi Indonesia, dengan kondisi dan konstelasi geografis yang sangat strategis dengan berbagai potensi energi dan potensi sumber kekayaan alam realitasnya sudah menjadi ajang sasaran permainan subversi yang dilakukan oleh state actor maupun non state actor. Dan ironisnya sebagian besar masyarakat kita pun kurang menyadari adanya berbagai ketergatangan kebijakan maupun komoditas tertentu di hampir semua aspek kehidupan dari negara-negara lain. Pada sisi lain ditengah pasang surutnya eksistensi Republik Indonesia yang sarat diwarnai oleh berbagai upaya pemberontaka, terorisme dan anarkhisme yang ingin mendiskreditkan pemerintah yang sah termasuk upaya penggulingan pemerintah secara inkonstitusional maka sudah saatnya dibutuhkan upaya bersama secara konkrit dalam memahami, mewaspadaai, menyikapi ancaman subversi melalui kesamaan persepsi, interpretasi dan tindakan antisipasi yang dapat mengganggu Ketahanan Nasional.

Berangkat dari pemahaman tersebut diatas, maka perlu dilakukan suatu kajian tentang mewaspadaai polarisasi ancaman subversi terhadap ketahanan nasional agar ancaman subversi tidak serta merta begitu mudah masuk dengan leluasa di Republik tercinta ini.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Memberikan suatu gambaran tentang eksistensi serta betapa bahayanya ancaman Subversi terhadap nilai Ketahanan Nasional.

- b. **Tujuan.** Untuk memberikan masukan dan mengingatkan kembali kepada kita semua tentang betapa bahayanya ancaman Subversi yang dapat meruntuhkan Ketahanan Nasional.
- 3. **Ruang Lingkup.** Di dalam tulisan ini membahas tentang kondisi sosial bangsa dengan tinjauan Teori Perang Subversi pada persepsi ancamannya terhadap nilai Ketahanan Nasional yang di susun dengan tata urut sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan.
 - b. Latar Belakang Pemikiran.
 - c. Tinjauan Subversi sebagai Ancaman.
 - d. Pengaruh Global dan Dinamika Subversi di Indonesia.
 - e. Analisa Potensi Subversi dalam Konteks Ketahanan Nasional.
 - f. Penutup.
- 4. **Method.** Dalam penulisan ini menggunakan kajian diskriptis dan pragmatis analisis serta tinjauan prediksi kedepan terhadap suatu obyek Ketahanan Nasional
- 5. **Pengertian.**
 - a. Subversi/Subversive artinya bersifat mengulingkan pemerintahan, memberontak.
 - b. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mengandung keuletan, daya tahan, ketangguhan dalam menghadapi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung

yang membahayakan kedaulatan, identitas dan integritas kehidupan bangsa.¹

c. Nilai Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi ketangguhan/kemampuan dari aspek ketahanan nasional yang tercermin pada ketahanan Ipoeksosbudhankam dalam pembangunan nasional.

d. Polarisasi /Polarization artinya pekerjaan mengutubkan.

e. Liberalisme. Berasal dari kata latin Liberalis, Liber berarti “Bebas, Merdeka, tidak terikat, tidak tergantung”. Pandangan dan gerakan Liberalisme menjunjung tinggi martabat pribadi manusia dan kemerdekaan, bila kebutuhan setiap pribadi manusia secara individu tercapai dengan sendirinya masyarakat dan negara akan maju oleh karena itu kaum liberalis menuntut kebebasan dan dihilangkan segala hambatannya².

f. Komunisme. Adalah sebuah teori atau sistem organisasi sosial yang di dasarkan pada pemilikan bersama atas harta kekayaan dan alat produksinya dalam masyarakat.

g. Ideologi. Adi Cita, atau dapat di terjemahkan ideologi sebenarnya adalah konsepsi manusia mengenai politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan untuk diterapkan di dalam masyarakat atau negara.

h. Imperialisme. Sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar.

¹ Lemhannas. Kewiraan. 1998

² A Mangunharjana. Isme Isme dalam Etika A-Z, Kanisius 1997.

BAB II

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

6. **Umum.** Sampai kapanpun Indonesia akan tetap menjadikan perhatian Dunia. Sebagai bangsa besar yang berciri kemajemukan, dengan semangat revolusionernya telah mampu mengusir kolonialisme dan imperialisme, bahkan beberapa waktu setelah kemerdekaannya, dalam sidang PBB Presiden menawarkan Pancasila sebagai Idealisme Internasional. Di sisi lain tinjauan Geo strategi Indonesia yang sangat strategis dan kaya dengan sumber daya alamnya menjadikan obyek daya tarik bagi semua kepentingan nasional bangsa-bangsa Dunia, sehingga dibalik nama besarnya pun tersekam potensi ancaman yang senantiasa dapat mengganggu ketenteraman dan kedaulatan bangsa ini sendiri.

7. **Landasan Pemikiran.**

a. **Paradigma Nasional.** Pancasila sebagai Ideologi negara merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam setiap penyelesaian masalah dan tantangannya, sehingga sebagai ideologi bangsa akan senantiasa bersanding dengan ideologi bangsa lain, berinteraksi dan saling mempengaruhi. Didalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat tercantum tujuan dan cita-cita bangsa. Secara jelas memberikan tugas kepada pemerintah agar melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan kepada kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk dapat mewujudkan tujuan nasional itu maka bangsa Indonesia harus memiliki Integritas dan soliditas dalam persatuan dan kesatuan bangsa, yang mampu menciptakan kondisi Ketahanan Nasional yang tangguh tercermin pada ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya dan ketahanan hankam. Di dalam upaya mewujudkannya diperlukan suatu strategi nasional yang berwawasan Nusantara yaitu memandang bahwa wilayah Negara Indonesia ini merupakan perwujudan kepulauan sebagai suatu kesatuan. Wawasan Nusantara sebagai visi yang bersifat Konseptual Filosofis dan Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konseptual Operasional, kemudian untuk mengawal bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan dan cita-citanya maka diperlukan tingkat kewaspadaan dari berbagai ancamannya yang diwadahi dalam Kewaspadaan Nasional. Oleh karena itu Kewaspadaan Nasional harus diimplementasikan dalam sikap nasionalisme pada semua aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat akan memiliki daya tangkal dan mampu untuk mengatasi potensi ancaman di sekitarnya terutama ancaman subversive karena pada hakekatnya suatu paham/ideologi itu tidak akan pernah kunjung padam.

b. Peraturan Perundang-undangan.

- 1) UU RI No 26 tahun 1999 tentang pencabutan UU Subversi. Menilai UU No 11/PnPs/Thn 1963 tentang Pemberantasan kegiatan Subversi itu bertentangan dengan hak azasi manusia dan prinsip negara yang berdasarkan atas

hukum serta menimbulkan ketidak pastian hukum sehingga didalam penerapannya menimbulkan ketidakadilan dan keresahan masyarakat.

Bahwa hak azasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa secara kodrat melekat pada diri manusia, meliputi antara lain hak memperoleh kepastian hukum dan persamaan kedudukan didalam hukum, keadilan dan rasa aman, hak mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, yang diharapkan dapat mengantar tegaknya keadilan, tersalurnya semua aspirasi di negara ini secara porposional dan tegaknya demokratisasi secara utuh.

2) UU RI No 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap Keamanan Negara. Bahwa paham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dalam dalam praktek kehidupan Politik dan Kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan azas-azas dan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang ber Tuhan dan beragama serta telah terbukti membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah Indonesia bagi partai komunis dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran

Komunis/Marxisme-Leninisme serta muatan dalam KUHP, terutama yang berkaitan dengan ketentuan mengenai kejahatan terhadap keamanan negara belum memberi landasan hukum yang kuat dalam usaha mempertahankan NKRI yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar Negara, maka ada penambahan enam ketentuan baru diantara pasal 107 dan pasal 108 Bab I Buku II KUHP tentang kejahatan terhadap Keamanan Negara yang dijadikan Pasal 107 a, Pasal 107 b, Pasal 107 c, Pasal 107 d, Pasal 107 e dan Pasal 107 f. Yang diharapkan dapat digunakan sebagai payung hukum untuk menyelamatkan bangsa, mencegah dan mengatasi segala bentuk ancaman yang dapat merusak kedaulatan NKRI.

3) UU RI No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Menunjuk Bab IV pasal 12 bahwa pengelolaan sistem pertahanan negara ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan, serta Bab III tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara pada pasal 6 menyatakan bahwa pertahanan negara di selenggarakan melalui usaha pembangunan dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancamannya, yang di dalam pasal 7 berikutnya menunjuk Pemerintah agar menyiapkan secara dini dengan menempatkan TNI untuk menghadapi ancaman militer dan menempatkan lembaga pemerintah lainnya untuk menghadapi ancaman non militer. Dengan demikian jelas bahwa pemerintah

mempunyai tanggung jawab dan rentang kewenangan yang cukup luas untuk mengantisipasi, mencegah dan menindak segala bentuk ancaman negara terutama bagi anasir-anasir subversi.

4) UU RI No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sesuai dengan apa yang tertuang didalam Bab IV pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa TNI sebagai alat negara berfungsi sebagai Penangkal, Penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa serta memulihkan kembali kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan sehingga sebagai komponen utama dalam Sistem Pertahanan Negara mempunyai tugas pokok tercantum dalam Bab IV Pasal 7 ayat 1 & 2, yang kemudian telah dijabarkan kedalam Doktrin TNI (Tri Darma Eka Karma) dan Dotrin TNI-AD (Kartika Eka Paksi) dalam menyikapi ancaman Subversi telah masuk kedalam bentuk Ancaman Militer serta berimplikasi ke sektor lain dalam bentuk ancaman Non Militer. Maka semakin jelaslah bagi pemerintah untuk membentuk suatu badan pelaksana yang dapat melibatkan semua unsur TNI didalam pelaksanaan mencegah dan menanggulangi aksi subversi.

c. Landasan Historis.

1) Sejarah Kebangsaan. Di dalam sejarah kebangsaan, Nusantara yang terletak membujur di katulistiwa diantara dua benua Asia dan Australia ini merupakan gugusan

ribuan kepulauan besar dan kecil yang diatasnya diduduki dan dikuasai oleh suku-suku bangsa dengan sistem kekuasaan raja-raja dalam tata kehidupan yang beraneka ragam sehingga tidak mencegah kemungkinan satu diantaranya terjadi konflik tentang kewilayahan yang berlanjut sampai pada peperangan. Di bagian barat pernah berdiri suatu kerajaan besar yang bernama Sriwijaya dengan pusat pemerintahan di pulau Sumatra dengan batas wilayah yang melebihi wilayah NKRI saat ini kemudian runtuh karena faktor ekonomi. Kemudian muncul lagi Majapahit dengan pusat pemerintahan di Jawa Timur yang wilayahnya sampai pulau Madagaskar dan Piliphina namun kemudian juga runtuh dengan sendirinya karena perang saudara, setelah itu tidak ada lagi muncul kerajaan sebesar itu tetapi wilayah Nusantara semakin ramai sebagai persinggahan dan pelintasan antar benua. Armada-armada berdalih perdagangan berdatangan menetap dalam kurun waktu yang lama seperti bangsa Portugis, bangsa Gujarat, dan bangsa Belanda dan sebagainya sehingga turut membentuk karakter suku-suku bangsa disaat itu. Disebabkan oleh suatu kepentingan, watak karakter ideologi suatu bangsa dalam etika hubungan Internasional maka terjadilah proses mutual simulalisis yang berlarut dari niat berniaga menjadi monopoli yang tidak terkontrol dengan hasil yang berlimpah yang ahirnya menjadi penjajahan. Nusantara saat itu dinikmati oleh penjajah-penjajah seperti Portugis yang menyisakan jejak di Timor Leste, Belanda dalam kurun waktu 350 tahun dengan mendirikan bentuk pemerintahan

Hindia Belanda yang kemudian beralih ketangan Jepang diawal Perang Dunia II.

2) Sejarah Kemerdekaan. Tekanan penjajahan dalam waktu yang cukup lama serta berganti cara penguasaannya telah turut membentuk watak dan karakter suku-suku bangsa di Nusantara, terjadilah aksi-aksi perlawanan yang berawal dari sikap kesukuan menjadi gerakan penyadaran bersamaan dari suatu kondisi rasa senasib dan sepenanggungan maka munculah gerakan yang bersifat nasionalisme yang bangkit diawali dengan Sumpah Pemuda pada kongresnya yang kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Setelah itu bak gayung bersambut , bangkitlah semangat kesatuan dan persatuan serentak melawan penjajahan Belanda dan Jepang, bertekad mengusir penjajahan dengan apa adanya yang dimiliki disaat itu melawan dengan tekad semangat juang yang hanya bersenjatakan bambu runcing saja, pergulatan tekad semangat bahu membahu inilah yang kemudian tersaripati didalam memaknai Ideologi bangsa Indonesia - "Pancasila", yang menyatakan Kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Ujian dan cobaan jiwa kesatuan dan persatuan kepada anak Bangsa Indonesia ini rupanya tidak hanya sampai pada kemerdekaannya dimana telah terjadi silih berganti pemberontakan dan pengkhianatan menguji ketegaran Ideologi bangsa hingga sampai saat ini.

8. **Dasar Pemikiran.** Sesuatu yang sangat dilematis, semua telah memahami bahwa pembangunan Nasional harus di topang dengan ketangguhan nilai-nilai ketahanan nasional tetapi disatu sisi masih ada pro dan kontra serta beda visi pemahaman tentang hakekat keamanan nasional yang justru melalui koridor tersebut semua elemen akan bisa turut berperan dalam menjaga keamanan bangsa sesuai "Perspektif wilayah tugas masing-masing". Ada fenomena apa di balik tarik ulur penetapan UU keamanan Nasional tersebut? Di era tranparansi ini semua mengerti tentang hakekat ancaman keamanan nasional yang bersumber dari beberapa jenis konflik misalnya konflik antar negara, Internal dan Lintas Negara/ trans nasional, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Konflik antar negara cenderung terjadi saat adanya benturan kepentingan nasional antara dua negara atau lebih, ini nyaris terjadi pada saat kasus Natuna, konfrontasi dengan Malaysia, Timor gate, Ambalat, Perbatasan Papua, Philipina, Singapura dan sebagainya.
- b. Konflik Internal memiliki karakteristik yang bersifat horizontal maupun vertikal, misal Idea dari G30S/PKI, DI / TII, Aceh Merdeka, Papua Merdeka, Republik Maluku Selatan, kasus Poso, Ambon, Sampit dan sebagainya.
- c. Konflik trans nasional melibatkan isu-isu yang memiliki dampak lintas batas negara yang di lakukan oleh pelaku trans nasional baik negara maupun non negara, seperti pelintas batas dengan Malaysia, Philipina, Papua New Guinea, Timor Leste dan lain-lain.

Dengan memahami sulitnya bangsa ini untuk bangkit dari keterpurukan dan urgensinya pemahaman keamanan nasional untuk mengejar, mengamankan dan mempertahankan tujuan nasional dari berbagai bentuk dan sumber ancaman maka menjadi jelas bahwa kebijakan keamanan nasional merupakan tanggung jawab dari otoritas politik harus segera diwujudkan. Berasumsi dari pengalaman sejarah, dikancah politik Indonesia dengan pengaruh dinamika lingkungan strategisnya, sepatutnyalah kita mewaspadaai adanya gerakan laten Subversive yang senantiasa menyertainya dengan sasaran bidiknya pada Ketahanan Nasional. Struktur dan kultur bangsa akan lemah, sehingga bangsa ini tidak akan pernah aman dan tentram senantiasa tetap dalam ketergantungan serta teraksesnya segala kepentingan nasional bangsa lain untuk menggali sumber energi kekayaan alam di bumi Indonesia.

BAB III

TINJAUAN SUBVERSI SEBAGAI ANCAMAN TERHADAP KETAHANAN NASIONAL

9. **Umum.** Sekalipun klasik, gerakan subversi sangat efektif dioperasionalkan sebelum pelaksanaan perang terbuka, berlanjut dalam perkembangannya sampai saat ini dalam upaya kepentingan nasional dan penguasaan wilayah terapan kegiatan subversive menyesuaikan keadaan lingkungan strategis sehingga suatu negara tanpa disadari telah dikuasai oleh negara yang lebih kuat dalam memaksakan kepentingan nasionalnya di negara lain.

10. **Tinjauan Teori Perang Subversi.** Perang subversi merupakan suatu cara untuk mengkondisikan keadaan yang sangat kompleks menjadi suatu kondisi yang bertahap menuju proses pematangan untuk perebutan kekuasaan/penggulingan pemerintahan yang sah, sebelum dilaksanakan perang terbuka. (Lihat lampiran A).

a. **Celah Kegiatan Subversive.** Sesuai dengan tujuannya dan agar proses pematangan kondisi dapat tersebar di semua aspek kehidupan masyarakat maka terapan kegiatan subversive haurs benar tepat sesuai dengan perkembangan lingkungan strategisnya sehingga didalam pelaksanaannya ditempuh menjadi dua jalur.

1) Kegiatan Subversive secara Konstitusional. Bergerak legal simultan dan menyusup dan masuk secara struktural kedalam badan-badan pemerintahan yang kemudian

mempengaruhi untuk mengadakan perubahan-perubahan sesuai kehendak sponsor.

2) Kegiatan Subversive secara Inkonstitusional (Revolusi bersenjata). Bergerak secara illegal berada diluar struktur pemerintahan, mengimbangi/parallel dengan derap kebijaksanaan pemerintah sambil membentuk opini di setiap aspek kehidupan masyarakat, mengeksploitasi sampai pada kondisi yang menguntungkan untuk bergerak dengan aksi kekerasan disemua sektor yang telah dikuasai dengan perimbangan kekuatan perlawanan bersenjata.

b. **Sasaran.** Meliputi semua sendi/aspek kehidupan bernegara yang di kelompokkan dalam istilah front meliputi :

1) Front Sosial Ekonomi. Para kader akan melaksanakan infiltrasi dalam bidang ekonomi dengan cara masuk menyusup ke perusahaan-perusahaan yang bersifat strategis, berupaya menjadi peran dan membentuk opini yang kemudian bila situasi dan kondisi memungkinkan secara perlahan mengambil alih pimpinan, pengambilan alih pimpinan tersebut berarti dalam pentahapannya sudah masuk ketahap II. Simultan dengan itu dilakukan pula pembentukan firma-firma yang ikut dalam perdagangan dunia. Tujuan Infiltrasi ke sektor ekonomi ini untuk merusak ekonomi dalam negeri dan menciptakan tekanan-tekanan ekonomi sambil mencari dana untuk keperluan subversinya. Prioritas utama adalah kebutuhan primer ekonomi rakyat agar timbul keresahan dan kekacauan yang kemudian ditingkatkan ke ekonomi sekunder bahkan sampai rusaknya

industri-industri strategis untuk menciptakan naiknya tingkat pengangguran dan krisis ekonomi guna melemahkan serta menjatuhkan wibawa pemerintah, diharapkan dalam kondisi seperti ini keamanan nasionalpun akan semakin goyah. Setelah para kader mengambil alih kendali ekonomi, masuk Fase Konsolidasi dimana mereka mulai menerapkan aturan perundang undangan dibidang ekonomi, menghapus kepemilikan swasta/perorangan.

Dibidang sosial, melakukan penyusunan ke berbagai organisasi politik, olah raga, kemahasiswaan, buruh, tani bahkan kedalam organisasi Angkatan Bersenjata serta membentuk ormas-ormas onderbouw dan sebagainya. Dilakukan secara terbuka maupun tertutup atau variasi keduanya sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing, sangat samar-samar, ada terasa sesuatu telah terjadi tetapi apa yang terjadi itu tidak jelas, yang mengerti hanyalah pengendali dari masing-masing gerakan tersebut. Setelah terbentuknya organisasi-organisasi yang digunakan sebagai kedok secara kuantitas maupun kualitas setelah dapat dukungan massa sebanyak banyaknya selanjutnya orgsnisasi dihimpun, dikelompokkan dalam suatu kekuatan tanpa diketahui hubungan antar kelompoknya yang seolah berdiri sendiri sebagai organisasi masyarakat untuk melakukan aksi-aksi massa yang dikendalikan secara tertutup. Setelah mendapat banyak dukungan massa lalu ditimbulkanlah *dialektische sprong*, yaitu titik berat beralih dari kuantita menjadi kualita yang digarap dengan lebih terarah dengan membentuk apa yang dinamakan hierarki

Parallel, dengan cara menempatkan kader-kader kedalam hierarki pemerintah dengan tujuan untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintah. Setelah para kader menduduki posisi-posisi kunci dibuatlah peraturan-peraturan untuk kepentingan Subversi, peraturan-peraturan yang dibuat sedemikian rupa sehingga semakin mengikat dalam kegiatan subversi lanjutannya.

2) Front Psikologi. Front ini digarap lebih awal untuk mengisi Psikhe massa dengan cara agitasi dengan tujuan untuk menimbulkan perasaan yang senantiasa tidak puas pada keadaan yang kemudian dari ketidakpuasan tersebut berubah menjadi sikap kritis dan menentang segala peraturan yang ada, membentuk aksi-aksi demoralisasi melawan pemerintah. Selanjutnya memobilisasi massa menekan pemerintah sampai hilangnya kepercayaan dari rakyat. Kelemahan-kelemahan ini dieksploitasi menjadi pertentangan dan perlawanan seperti antara buruh dengan majikannya sampai kepada aksi pemogokan umum, diterapkan juga pada ketegangan-ketegangan yang bersumber dari SARA agar dapat langsung mengoyak ketenteraman masyarakat. Kedua hal tersebut akan berdampak pada front Ekonomi dan front Keamanan sehingga konflik akan dapat segera meluas, semakin dapat dipertajam dengan melancarkan aksi Terror dan sabotase, cipta kondisi menjadikan perasaan cemas, tegang dan rasa takut serta saling mencurigai di masyarakat sehingga tidak ada lagi kekuatan masyarakat lainnya yang berani

menentang. Kondisi sosial masyarakat diarahkan menjadi tidak terkendali. Ironisnya disaat seperti ini penggerak Subversi justru melancarkan aksi yang bersifat sugestif sebagai alat *Penghipnotis masyarakat* dalam bentuk suatu kegiatan yang nampak dari luar bersifat sosial untuk membantu masyarakat kelas bawah namun aksi terror dan sabotase tetap terus ditingkatkan diarahkan kepada kelompok, organisasi sampai kepada perorangan tertentu yang dinilai menghalangi kegiatan Subversi, sedangkan dikalangan masyarakat dibentuk opini melalui propaganda/ perang urat syaraf agar meyakini bahwa keadaan baru yang lebih baik akan segera datang sebagai hasil gerakan Subversi. Akhirnya dilakukan pengintegrasian dan pengalihan peran individu ke dalam organisasi secara keseluruhan antara lain dalam bentuk komune-komune.

3) Front Politik Dalam Negeri. Diawali dengan membentuk Front Nasional, untuk dapat duduk dalam pemerintahan dan berusaha untuk bisa menduduki tempat-tempat penting seperti DEPDAGRI, DEPDIBUD, dan sebagainya mereka ditonjolkan dengan maksud untuk menimbulkan kesan bahwa seolah-olah tokoh yang ditonjolkan itulah yang akan dapat memperbaiki keadaan. Bersama dengan kesatuan aksi, tanpa mereka sadari, digunakan untuk kepentingan Subversi seperti ormas-ormas termasuk Angkatan Bersenjata, digarap agar menjadi vokal untuk membawa pesan yang senada dengan kehendak Subversi. Selanjutnya front Nasional ditingkatkan menjadi front Kesatuan, upaya ini dilakukan

agar mendapat kesan seolah-olah keadaan yang sedang berlaku bertujuan untuk lebih memperkuat persatuan nasional. Seiring dengan penguasaan posisi-posisi penting dalam pemerintahan yang sah terus ditingkatkan, setelah berhasil maka front Nasional ditetapkan menjadi front Kesatuan. Sejalan dengan keadaan kekuatan-kekuatan rakyat yang sudah sangat eksplosive dan revolusioner digabungkan dan siap untuk mengambil alih kekuasaan. Jika berhasil maka ditingkat daerah akan didirikan apa yang dinamakan Front Rakyat. Pada taraf inilah dapat terjadi semacam gerakan rakyat yang menjadi hakim.

4) Front Politik Luar Negeri. Negara Sponsor, negara-negara asing yang membantu subversi akan melakukan gerakan politik luar negrinya dengan mendiskreditkan/ mencela terhadap politik luar negeri negara yang menjadi sasaran Subversi dengan tujuan menghilangkan kepercayaan negara lain, mengisolasi negara sasaran, mencegah dukungan politik maupun ekonomi sampai daya tahan nasional negara sasaran menjadi lemah, hingga pada kondisi tertentu negara sasaran akan terseret ke arah yang sesuai dengan kehendak politik luar negeri negara sponsor.

Setelah kekuasaan dapat diambil alih, negara pendukung dan negara satelitnya akan seponatan memberikan dukungan dan pengakuan Internasionalnya, bantuan-bantuan yang diberikan kepada pemerintahan yang baru mengambil alih kekuasaan akan sangat mengikat dan negara baru ini akan menjadi negara satelit baru dari negara sponsor Subversi.

5) Front Militer/Keamanan. Front ini sebagai muara Subversi, ketertiban dan keamanan yang terganggu akan sangat memudahkan penggarapan front-front lainnya sedangkan di bidang keamanan disiapkan untuk membentuk kekuatan bersenjata jika suatu saat perlawanan bersenjata perlu dilakukan. Mengganggu/merusak ketertiban masyarakat dimulai dengan Agitasi, ancaman, adu domba, perampokan, pembunuhan, penculikan sampai dengan fitnah yang mempunyai pengaruh sangat buruk, sehingga masyarakat terpecah belah, saling mencurigai dan merasa tidak aman. Umumnya penjahat, residivis dan buronan diorganisir guna menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan. Di saat Instabilitas merebak, bersamaan tersebut mulai dibentuk kekuatan bersenjata, anggota angkatan bersenjata yang telah terbina oleh kader-kader subversi mulai ditempatkan kedalam organisasi yang disusun untuk keperluan pengambil alihan kekuasaan dengan perlawanan bersenjata dengan tulang punggung kekuatannya berada pada buruh dan tani yang dipersenjatai, basis-basis gerilya disiapkan terutama di daerah-daerah dimana banyak terdapat pendukung kegiatan Subversi. Sampai pada tingkat ini rekrutmen buruh dan tani tumbuh menjadi kekuatan bersenjata untuk melawan pemerintah yang sah dengan melakukan perang gerilya.

c. **Tahapan.** Dari kelima front tersebut diatas dibagi lagi menjadi enam tahap. Setiap tahapan dari masing-masing front sasaran tersebut digarap dengan eskalasi dan spektrum yang meningkat serta meluas.

d. **Fase.** Dari ke enam tahap tersebut dikelompokkan kedalam tiga fase yaitu : (Lihat Lampiran A)

- 1) Fase Persiapan, meliputi tahap I dan tahap II.
- 2) Fase Krisis, meliputi Tahap III, Tahap IV dan Tahap V, didalam fase ini menempatkan kuantita untuk mengikat massa.
- 3) Fase Konsolidasi, berada penuh pada tahap VI.

11. Perkembangan Subversi.

a. **Subversi dari Masa ke Masa.** Perebutan kekuasaan sudah sering terjadi sejak manusia mengenal budaya kekuasaan, penggunaan istilah Subversi saat itu belum dikenal, Subversi populer setelah Perang Dunia II.

- 1) Sebelum Perang Dunia II, subversi dikenal dengan istilah Spionase dan Kolone ke V :
 - a) Spionase mempunyai pengertian sama dengan seperti saat ini yaitu segala upaya yang tertutup dalam rangka mencari dan mengumpulkan data Intelijen yang menyangkut kemampuan nasional negara tertentu yang dititik beratkan kepada kemampuan dan kekuatan angkatan perangnya.

b) Kolone ke V adalah istilah yang diberikan kepada kekuatan rakyat/penduduk negara sasaran yang dengan rela membantu invasi musuh. Penggunaan kolone ke V pada mulanya dilakukan secara terbatas sebagai hasil usaha spionase yang mampu untuk menarik simpatikannya di negara sasaran serta dapat digunakan untuk tugas sebagai penunjuk jalan, pengarah kesasaran-sasaran terpilih dan sabotir (tertuang sebagai ancaman militer dalam doktrin KEP). Satu kesatuan kolone ke V biasanya dipimpin oleh para agen Musuh/Spionase yang ditugaskan dinegara sasaran sampai dengan keberhasilan Operasi Invasi musuh yang kemudian dibentuk organisasi-organisasi untuk memperkuat kekuasaannya, Gemilang keberhasilan ini terukir didalam sejarah Jerman Raya yang kemudian ditiru dan dikembangkan oleh negara-negara lainnya. Peristiwa ini kemudian dibukukan yang kemudian dikenal sebagai bentuk Subversi dalam rangka untuk mempersiapkan perang yang akan ditindak lanjuti dengan penyerbuan oleh negara musuh ke negara sasaran.

2) Setelah Perang Dunia II, pada saat itu dalam lingkungan strategis dikenal istilah Monopolar, Bipolar dan Multipolar dunia terpetak petak dalam pakta-pakta pertahanan. Bangsa Indonesia yang baru Merdeka dari penjajahan Belanda dengan prinsip politik luar negerinya yang bebas aktif memprakarsai gerakan Non Blok. Seiring dengan hal tersebut Subversive berkembang pesat menjadi populer

dengan pengertian untuk menggambarkan usaha-usaha dari suatu negara asing (Sponsor) untuk mempengaruhi rakyat dari negara sasaran untuk menyusun kekuatan berdasarkan suatu konsepsi politik untuk merebut kekuasaan negara sasaran yang kemudian merubah sistem politik yang berlaku di negara tersebut dengan konsepsi politik yang lain. Dengan cara seperti ini negara sponsor akan mencapai tujuannya yaitu memperbesar dukungan dan lingkup pengaruh sesuai dengan kepentingannya. Situasi dan kondisi Internasional saat itu (seperti uraian diatas) sangat memungkinkan berkembangnya Pola Subversive. Disaat itu lahir negara-negara Merdeka yang baru dari bekas daerah-daerah jajahan Belanda dan Inggris, yang secara umum berada dalam kondisi yang labil, lemah dan masih terbelakang serta belum menemukan bentuk sistem ketatanegaraan yang nyata dan pasti. Keadaan negara-negara baru seperti ini mudah dieksploitir oleh negara-negara besar dalam upayanya untuk memelihara dan menjamin kepentingan nasionalnya yang tentunya akan bertentangan dengan kepentingan nasional negara-negara yang baru merdeka sehingga dalam dinamika hubungan Internasional pun terjadi konflik antar kepentingan nasional. Dikala dunia hanya diwarnai dua kekuatan super power, terjadi tarik menarik kepentingan nasional kearah dua kutub tersebut sehingga perkembangan konflik itupun semakin meruncing dan turut mendorong mempercepat perkembangan Subversive yang secara konsepsional saat itu dikenal dengan "A New Type of War". Dilingkungan negara-negara

berkembang timbul pertentangan dalam negeri maupun dengan negara tetangga yang diselesaikan dengan kekerasan senjata yang dikenal dengan berbagai sebutan seperti "Perang Terbatas" (Limited War), "Perang Adil" (Just War), "Perang Pembebasan Nasional" (War of National Liberation) dan "Perang dalam negeri/Perang saudara" (Internal War). Pengalaman pahit bangsa Indonesia saat itu bertitik kulminasi pada aksi kudeta yang gagal oleh Komunisme melalui Patai Komunis Indonesia dengan aksi G30S/PKI yang banyak memakan korban anak bangsa dan turunya Bung Karno sebagai Presiden RI pertama.

b. **Subversi sebagai Konsepsi Perjuangan.** Akurasi kegiatan subversi telah membuktikan keampuhannya karena Subversi merupakan jawaban yang tepat untuk segala usaha itu sebagai metode yang relatif murah dengan resiko yang kecil tetapi efektif dan efisien, disaat itu Blok Timur di bawah pimpinan Uni Soviet mengembangkan dan memantapkan posisinya dengan memperluas daerah pengaruhnya melalui dukungan kepada negara-negara yang sedang bergolak terutama di Asia, Afrika dan Amerika Latin sedangkan dipihak lain Amerika menggelar "Containment Policy" membatasi perkembangan Komunis di bagian dunia yang vital. Berawal dari upaya menjamin kepentingan nasional disaat perang dingin telah berkembang kepada terapan kepentingan Blok super-power.

Di era globalisasi saat ini terutama setelah runtuhnya Uni Soviet maka masing-masing blok dan pakta-pakta pertahanan pun mereformasi diri sesuai dengan lingkungan strategisnya.

Secara de facto mereka merestrukturisasi, secara de jure suatu paham tidak akan pernah luntur apalagi bila telah menyatu dengan karakter suatu bangsa, fakta tersebut teridentifikasi terutama dalam lingkup bangsa Indonesia sendiri, gagalnya kudeta dari PKI dan upaya kuat era Orde Baru mengikis habis paham komunis di Indonesia yang seolah-olah tidak mungkin akan tampak lagi di permukaan bumi Indonesia, tetapi seiring dengan gerakan Reformasi terapan paham itu muncul kembali bahkan diakui oleh dewan majelis hanya dengan merubah baju dalam wujud partai & keorganisasian seperti SBSI, PRD beserta ormas onderbouwnya (SMID, PPBI, STN, JAKER, SRDJ dan SRS), KIPP, MARI yang di dalam manifesto perjuangan politiknya secara nyata mengorganisir rakyat untuk melakukan aksi perlawanan terhadap pemerintah dengan menawarkan suatu kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, keluar dari problema kongkret yang menimpa masyarakat baik di bidang politik dan ekonomi³. Dalam bentuk lain muncul idea untuk melepaskan diri dari NKRI seperti Pemberontakan RMS, DI/TII, PRRI/PERMESTA, OPM, GAM dan sekarang aksi terorisme yang bisa bergerak bebas meledakkan bom dimana saja yang pada kenyataannya segala aksi itu selalu didukung oleh kekuatan-kekuatan asing. Modus perjuangan subversi bergerak senantiasa beriringan dengan perkembangan lingkungan strategis sehingga sulit dikenal dan dideteksi⁴.

³ KPP-PRD, Siaran Pers atas Pengadilan 14 Aktifis PRD, Jakarta 12 Des 1996

⁴ Nurhadi P mantan Kapuspen TNI, Pro Kontra Koter, Jakarta 28 Nov 2005.

12. Pola Umum Subversi.

a. **Subversi Komunis.** Komunisme pertama kali muncul di Perancis pada tahun 1848 dicetuskan oleh Etienne Cabet melalui karyanya *Voyage en Icarine* yang memperkenalkan gagasan komunis damai, namun substansinya adalah sebuah teori atau sistem organisasi sosial yang didasarkan pada kepemilikan bersama atas harta kekayaan dan alat produksinya. Dalam masyarakat komunis, semua harta benda dimiliki bersama dan segala aktifitas ekonomi direncanakan dan dikontrol bersama pula, sedangkan proses distribusi masing-masing memperoleh menurut kapasitasnya dan sesuai dengan kebutuhannya. Pada perkembangan selanjutnya Komunis menjadi sebuah Ideologi yang bersifat Totaliterisme yang memiliki makna bahwa semua hak pribadi dan aspek kehidupan rakyat diawasi dan dikendalikan oleh Pemerintah atau Partai. Pengembangan Teori dasar Komunisme :

1) Karl Marx. Historis materialisme atau Dialektika materialisme, Teori Nilai Lebih, Individu dan masyarakat serta Atheis, yang memunculkan pertentangan kelas di masyarakat antara budak dan bangsawan, petani dan tuan tanah, proletar dan kapitalis, bangsa yang dijajah dengan kolonialis, Imperialis dan komunis.

2) Nikolai Lenin. Mengembangkan ajaran Karl Marx, bahwa dari pertentangan kelas seponatan akan muncul kesadaran kelasnya yang kemudian akan tumbuh pimpinan atau elit komunis yang terdiri dari Kaum Revolusioner profesional yang kelak dapat mengarahkan masyarakat dan

kehidupannya untuk mencapai cita-cita Komunis. Disamping menggunakan kekuatan Revolusioner juga menerapkan lapisan-lapisan kekuatan pendukung dengan istilah "Orang tolol yang berguna" seperti Simpatisan dan boneka lainnya yang dapat dimanfaatkan tanpa tau tujuan sebenarnya. Teori ini akhirnya menentang keras kapitalisme yang dapat menjadi imperialisme dan menguasai dunia.

3) Josep Stalin. Mengembangkan ajaran komunis dengan Doktrin Perang Permanen, bertekad untuk memimpin dunia, menekankan konsolidasi kedalam, mengembangkan industrialisasi/teknologi terutama untuk kepentingan militer guna pelaksanaan operasi militer dan invasi untuk mengkomunikasikan dunia di bawah kepemimpinan Rusia.

4) Georgi Dimitrov. Menghadapi dinamika Globalisasi, Partai komunis Uni Soviet mengembangkan strategi baru untuk membangun secara internasional simpatisan terhadap perjuangan komunis melalui Strategi garis lunak Georgi Dimitrov dengan motto seorang simpatisan lebih penting dari seratus anggota partai komunis. Membina simpatisan seluruh dunia (di antaranya LSM-LSM) melalui pembentukan badan-badan Non Governmental Organization (NGO).

5) Mikhail Gorbachev. Konsisten pada strategi Global pada 1985 diterapkan kebijakan Glasnost dan Perestroika yang merupakan revolusi pemikiran dalam ajaran komunisme karena menyadari bahwa ekonomi merupakan penopang utama, sebagai super power baru dibidang militer/

persenjataan tetapi sangat ketinggalan jauh dibidang ekonomi. Saat itu ekonomi uni soviet sangat parah, gairah masyarakat rendah sementara peran politikus sangat dominan dan koruptif, sedangkan modal dan tehnologi tinggi terdapat disektor barat, Amerika Serikat dan Jepang. Sehingga untuk memperbaiki perekonomian Komunis diperlukan liberalisme Ekonomi yang di imbangi dengan reformasi politik. Dengan adanya perubahan total pada sistem politik dan sistem Ekonomi tidak harus berarti perubahan Ideologi. Teori ini kemudian dinilai sukses besar sebagai keberhasilan penyesuaian sistem ekonomi komunis yang didalam perkembangannya kemudian dikenal dengan istilah komunis gaya baru dengan nama baru- Sosialisme Demokratis – Komunisme Gorbachevis.

6) Mao Tse Tung. Mengembangkan ajaran komunis dengan kebesaran sejarah Cina dan kekuatan rakyat RRC sehingga menurutnya RRC lebih berhak memimpin dunia. Untuk mewujudkan cita-citanya diterapkan "Doktrin Revolusi Permanen" yang dilaksanakan dengan kekuatan domestik yang terdiri dari partai sebagai Revolusioner Utama di bantu oleh kelas-kelas lain seperti proletar, intelektual, unsur-unsur potensi wilayah dan lain-lain, dengan demikian RRC tidak akan melaksanakan invasi militer, karena menurut Mao Tse Tung "damai adalah perang tanpa pertumpahan darah".

b. **Subversi Barat.** Guna mendukung misi kepentingan nasional, negara-negara barat atau yang lazimnya disebut kapitalisme dan imperialisme senantiasa memperkuat angkatan bersenjata, dalam hubungan Internasionalpun selalu berada dalam bayangan kekuatan militernya. Sepintas tidak akan menerapkan Pola Subversi karena akan bertentangan dengan demokratisasi, HAM dan pelestarian lingkungan hidup yang senantiasa di dengungkan namun harus diwaspadai dari beberapa terapannya justru dimanfaatkannya sebagai kuda Troya untuk menguasai suatu wilayah/negara yang di area tersebut ternyata merupakan sasaran alternatif dari kepentingan nasionalnya, sehingga pola subversi yang laksanakan semata tidak berdasarkan konsep penanaman ideologi tetapi lebih berorientasi kepada kepentingan nasionalnya yang diantaranya untuk membatasi dan mengeliminasi pengaruh komunis yang dapat mengancam kepentingan nasional serta posisi strategisnya dalam hubungan internasional. Sebagai negara yang berazaskan Liberalisme dengan kebebasan individu yang besar maka untuk melindungi kepentingan nasional tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan keinginan rakyatnya. Pasca runtuhnya Uni Soviet, saat ini kegiatan tersebut dapat dicermati pada kebijakan politik luar negeri Amerika dan sekutunya.

13. **Subversi di Republik Indonesia.** Suku-suku bangsa sebelum Indonesia merdeka telah memiliki budaya untuk saling menguasai, dapat di cermati dari hampir semua daerah di tanah air Indonesia ini memiliki tari-tarian yang bermotifkan peperangan atau perkelahian sehingga dapat dipastikan bangsa Indonesia yang di

kenal ramah tamah juga menyimpan potensi untuk saling menguasai. Dalam sejarah kebangsaan, runtuhnya kerajaan-kerajaan lebih banyak disebabkan kerana perebutan/penggulingan kekuasaan dalam lingkungan keluarga raja sendiri sehingga kaum kolonialisme dan imperialisme lebih mudah menguasai. Kemudian setelah Proklamasi kemerdekaan upaya untuk saling menguasai tetap eksist dan saling menjatuhkan seperti komunisme melalui Partainya (PKI) dan gerakan Islam tertentu yang menghendaki terbentuknya Negara Islam Indonesia melalui partainya (Masyumi), Liberalisme melalui PRRI – Permesta serta boneka-boneka Belanda Agresi I – II, Andi azis, Westerling, RMS di Maluku dan OPM di Papua.

Pada masa pasca Reformasi seiring dengan dinamika global dan urgensinya tingkat kepentingan nasional negara-negara super power maka mengimbas pada penerapan pola Subversi yang lebih lunak dan halus melalui upaya diplomasi yang berakibat pada keterikatan dan ketergantungan yang dapat berdampak kepada kebijakan politik dalam negeri serta cara berfikir masyarakat yang berakhir pada penguasaan wilayah baik secara langsung maupun tidak langsung. Indikasi Subversive secara konstitusional mulai tampak dengan adanya upaya meng amandemen UUD 1945 sampai empat kali dalam empat tahun yang masih berlanjut untuk yang kelima, sehingga beralasan kuat bisa dibentuknya Partai Politik berazaskan Sosialis Demokrat dan Syariat Islam serta upaya konsolidasinya kembali eks Partai Komunis Indonesia yang sangat membahayakan Ideologi Pancasila.

a. **Gerakan Subversi.** Tidak lepas dari tinjauan sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masih menyisakan potensi konflik yang disebabkan belum bulatnya kesepakatan tentang sila pertama dari Pancasila, bentuk Negara dan hal pertimbangan keuangan, sehingga muncul gerakan-gerakan pemberontakan yang walaupun pernah ditumpas tapi sampai saat ini masih ada potensi gerakan subversi melalui :

1) Teraspirasi perjuangan Masyumi dan fanatisme untuk tetap ingin mendirikan negara Islam. Berawal dari DI/TII di Jawa Barat-Aceh- Sulawesi Selatan, senyap sejenak kemudian timbul NII dengan sektornya KW-I sampai IX yang kemudian bermetamorfosis menjadi JI (basis Malaysia) yang mengadopsi maklumat Terrorisme Internasional dengan 4 wilayah mantighinya dan KW IX Ma'had Al Zaytun⁵ (Jawa Barat) serta KPPSI (Sulsel) yang menghendaki merdeka atau otonomi khusus, disisi lain adanya partai politik yang memperjuangkan berlakunya Syariat Islam seperti PBB, PKS dan lain-lain.

2) Dampak sempitnya pemahaman nilai kebangsaan dan pengaruh asing, walaupun masih terkesan sangat lunak, tetap berkeinginan kembali dalam bentuk Negara Federal dan pemisahan diri dari NKRI, seperti gerakan PRRI-Permesta yang tetap mengembangkan organisasinya, gerakan RMS, GAM dan OPM yang tetap menjalin hubungan dengan kekuatan politik luar negerinya.

⁵ Hartono Ahmad Jaiz. Aliran dan Paham Sesat di Indonesia. Pustaka Al Kautsar. 2007

3) Terbentuknya opini masyarakat, akibat dari bebasnya gerakan LSM-LSM sehingga muncul kembali partai politik yang berasas sosialis demokrat dan pemahaman liberalisme lainnya seperti JIL, Pluralisme, Fundamentalisme dan sebagainya yang telah berbenturan di masyarakat.

b. **Celah Peluang Subversi.** Pasca Reformasi dimana maraknya tuntutan tentang kebebasan serta adanya kelemahan hukum akibat peratifikasian hukum Internasional maka celah peluang subversi semakin melebar, dengan identifikasi sebagai berikut.

1) Dari Dalam Negeri. Bhineka Tunggal Ika berciri khas tentang kemajemukan. The Founding Fathers telah mampu mengemas potensi kemajemukan menjadi semangat kebangsaan yang melalui Revolusi 1945 nya mewujudkan hasil gemilang Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dari moment tersebut sampai saat ini kondisi sosial politik dalam negeri bangsa Indonesia mengalami pasang surut dan bahkan timbul pemberontakan, separatisme dan aksi-aksi lainnya yang mengecam kebijaksanaan pemerintahan yang sah yang bila di pilah pengelompokkan dasar perjuangannya ternyata dalam proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia masih belum menuntaskan suatu permasalahan yang sangat esensial adalah :

a) Tentang Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, kelompok muslim garis keras yang diprakarsai Masyumi tetap menghendaki tertulis seperti Piagam Jakarta, mewajibkan syariat Islam bagi pemeluknya, yang hingga

saat ini masih menginspirasi beberapa kelompok masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam.

b) Tentang bentuk negara, tarik menarik antara negara republik dan negara federal, sehingga didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini pernah diberlakukan UUD 1945, Undang-Undang Dasar Sementara dengan Republik Indonesia Serikatnya serta kembali lagi ke UUD 1945 melalui dekrit Presiden 5 juli 1959 yang hingga kini pasca reformasi timbul kembali wacana negara Federal yang justru dicetuskan oleh tokoh reformis sendiri.

c) Tentang perimbangan keuangan, menjadi polemik antara pusat dan daerah, baru tersentuh setelah UUD 1945 di amandemen yang ke III dan ke IV, sekalipun demikian masih terjadi inskonsistensinya sehingga masih banyak kegiatan korupsi dan masuknya investasi asing yang hanya berorientasi kepada kepentingan daerah dari pada pembangunan nasional secara utuh.

2) Dari Luar Negeri. Semakin mendesaknya kebutuhan energi serta kepentingan nasional bangsa lain yang menjadikan kawasan wilayah Indonesia sebagai alternatif sasarannya. Kondisi ini klasik dapat diketahui bahwa hampir setiap terjadinya konflik dapat dipastikan adanya keterlibatan asing dan daerah konflik memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi.

c. **Upaya Pemerintah.** Dari beberapa kali gerakan Subversi yang dilaksanakan oleh partai komunis selalu berakhir dengan kegagalan, maka munculah beberapa upaya pemerintah untuk mencegah lebih dini yang diawali dengan tuntutan rakyat sebagai berikut :

1) Tri Tura. Pasca G30S/PKI yang dimulai pada tanggal 10 Januari 1966 merupakan cetusan hati nurani rakyat yang merasakan kebobrokan di semua aspek kehidupan masyarakat dengan tuntutan : Turunkan harga (Inflasi saat itu 600 s/d1000%), rombak Kabinet Dwi Kora (Politik Pemerintah) dan bubarkan PKI (Ideologi politik). Kemudian keluarlah Ketetapan MPRS No XXV/1966 yang membubarkan PKI, melarang 128 organisasi matelnya dan melarang penyebaran ajaran Marxisme-Leninisme/ Komunis⁶.

2) Melalui UU RI No 5 thn 1969 tentang Subversi. Undang-undang ini mengukuhkan Penpres nomor 11 tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi, dengan batasan ini dapat ditemukan ciri Subversi seperti adanya suatu konsepsi dengan tujuan akhir untuk menggulingkan pemerintahan yang biasanya disertai dengan campur tangan asing. Didalam pelaksanaannya diperkuat dengan Instruksi Presiden No 10/1982. Di awal tahun 1980 resesi ekonomi dunia ikut melanda Indonesia, kondisi rawan dikalangan masyarakat meningkat, disaat seperti ini kembali eksis

⁶ Direktorat Khusus. Lemhannas.Padnas dan Strategi baru Komunis. Mabes ABRI .1990

kegiatan eks PKI dengan mengeluarkan maklumatnya untuk muncul kembali, maka Presiden Soeharto mengeluarkan instruksinya membentuk Kopkamtib dan mewajibkan para menteri kabinet pembangunannya untuk menyelenggarakan Kewaspadaan Nasional, secara teknis dilaksanakan oleh Pangkopkamtib dan Lemhannas. Dalam tinjauan berikutnya menunjukkan hasil yang baik, aman dan menstabilkan keamanan nasional. Selanjutnya pada awal 1990 di kampanyekan Kewaspadaan Nasional sebagai strategi nasional dalam menghadapi musuh-musuh Pancasila dengan materi P4 untuk memahami Pancasila (sejarah, isi dan implementasinya) dan Kewaspadaan Nasional untuk mengamankan Pancasila⁷. Sampai dengan Pasca Reformasi keampuhan UU Subversi ini telah mampu menjerat/ menghukum semua yang berindikasi subversi. Namun UU Subversi ini akhirnya dicabut pada tgl 19 Mei 1999 saat pemerintahan BJ Habibie.

3) Dengan UU RI No 27 Thn 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Pasca Reformasi terutama setelah adanya rekomendasi Komnas HAM kepada Pemerintah untuk mencabut UU Subversi karena menurut pendapat Komnas HAM bertentangan dengan politik hukum demokrasi dan aspirasi masyarakat, setelah lebih satu tahun Komnas HAM mengkaji eksistensi UU Subversi tersebut menurutnya cukup dengan KUHP sudah mampu untuk melindungi

⁷ Ibid hlm 5.

kepentingan Negara⁸. Pemerintah melalui UU RI No 26 thn 1999 mencabut UU Subversi dan memutuskan juga berlakunya UU RI No 27 thn 1999 yang merubah KUHP, menambah 6 ketentuan baru pada pasal 107.

14. Kondisi Aspek Ketahanan Nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari setiap aspek kehidupan bangsa dan negara, untuk menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara melalui pembangunan nasionalnya. Cermin ketangguhan ketahanan nasional dapat diketahui dari nilai kualitas ketahanan IPOLEKSOSBUD HANKAM. Subversi dalam upaya pencapaian tujuannya, yang berlatarbelakang Ideologi maupun kepentingan nasionalnya akan membidik semua aspek kehidupan bangsa yang berimplikasi pada aspek kondisi sosialnya, aspek kehidupan bangsa meliputi :

a. **Aspek Alamiah.** Dengan memahami Geostrategi Indonesia, membangkitkan minat aktor subversi untuk menembangkan kegiatannya dalam penguasaan wilayah, ada sasaran dan banyak peluang yang dapat dimanfaatkannya.

1) Geografi. Posisi Indonesia yang sangat strategis memiliki berbagai kerawanan serta sebagai negara kepulauan sudah dapat dipastikan akan memiliki permasalahan didalam pemerataan pembangunan, pertahanan, keamanan, transportasi, komunikasi. Kondisi geografi yang heterogen

⁸ Htt.// . Kompas Online. Rekomendasi Komnas HAM kepada Pemerintah. Kamis, 8 Februari 1996.

merupakan potensi timbulnya bencana yang dapat berdampak kesemua aspek kehidupan masyarakatnya.

2) Demografi. Populasi penduduk dengan pendidikan yang rendah telah berpengaruh terhadap kualitas SDM, penyebaran penduduk yang belum merata dan terbatasnya lapangan pekerjaan telah meningkatkan pengangguran sehingga menimbulkan kerawanan sosial. Perpindahan penduduk dan pengungsi karena faktor ekonomi keamanan dan bencana bila tidak segera teratasi akan dapat menimbulkan permasalahan.

3) Sumber Kekayaan Alam. Potensi kekayaan alam di bumi Indonesia sangat luar biasa dan belum terkelola dengan baik, keterbatasan kemampuan pemerintah mengakibatkan ketergantungan kepada pihak asing. Penerapan ekonomi daerah yang belum siap, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kemampuan negosiasi telah memberikan peluang bagi perusahaan asing mengeksploitasi secara berlebihan serta tidak transparan, sehingga merugikan pihak Indonesia. Banyak terdapat pengelolaan sumberdaya alam secara liar/illegal yang berakibat kerusakan lingkungan hidup dan kelangkaan dimasa yang akan datang. Banyak kepentingan negara lain yang telah memanfaatkan potensi kelemahan ini, terindikasi di beberapa daerah konflik dapat dipastikan disitu mengandung potensi sumber kekayaan alam yang tinggi.

b. **Aspek Sosial.** Merupakan kondisi dinamis dari aspek alamiah dan cermin ketangguhan ketahanan nasional, kelemahan pada aspek ini dapat di eksploitasi oleh aktor subversi sesuai tahapan gerakannya. Bangsa Indonesia yang bercirikan pada kemajemukan sangat sarat dengan permasalahan sosial yang berpotensi konflik.

1) **Ideologi.** Pasca reformasi banyak generasi muda Indonesia berfikir skeptis terhadap Pancasila, pemahaman dan penghayatan Pancasila mengalami degradasi, ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin memaksakan pahamnya kedalam kehidupan masyarakat di luar Ideologi Pancasila. Saat ini sangat jelas adanya tarik menarik pengaruh ideologi dari empat kelompok besar yaitu : Demokrasi berbasis Nasional, Liberal, Agama sentris dan Sosialis Komunis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2) **Politik.** Sudah mejadi khas bangsa kita pada setiap menjelang Pemilihan umum yang disepakati sebagai pestanya demokrasi Pancasila, masih sering terjadi penyimpangan yang memicu konflik, munculnya terapan empat paham ideologi asing tersebut di dalam satu wacana kegiatan masyarakat menjadikan hilangnya karakter budaya bangsa Indonesia berubah menjadi radikal dan anarkis. Tahun 2009 bangsa ini akan memasuki kembali masa tersebut didalam suatu fenomena lemahnya pemahaman tentang Ideologi Pancasila serta belum mentasnya bangsa ini dari belenggu sulitnya ekonomi dan UU Pemilu yang belum disosialisasikan, sehingga kompleksitas permasalahan akan mudah pecah menjadi konflik.

3) Ekonomi. Saat menjelang Pemilu 2009 sudah terasa adanya kesulitan ekonomi rakyat, di beberapa tempat terdapat sulitnya bahan pokok primer yang telah mengantar rakyat kecil berkomentar tentang lemahnya pemerintah terutama adanya beberapa rakyat kita yang masih kurang gizi dan mati kelaparan yang justru keberadaannya di kota besar. Koperasi sebagai soko guru ekonomi kerakyatan tidak ditangani secara profesional dan proporsional sehingga sulit berkembang. Bidang pariwisata yang merupakan pemasuk devisa terbesar masih dalam bayang bayang travel warning sehingga dapat diprediksikan menjelang Pemilu ini sektor wisata akan mengalami penurunan. Adanya campur tangan partai politik dalam pengelolaan BUMN yang berakibat beberapa BUMN dilakukan divestasi ke pihak asing yang merugikan pemerintah yang akan datang. Adanya ketergantungan pemerintah terhadap lembaga keuangan asing seperti World Bank, IMF dan sebagainya. Berlakunya pasar bebas dan rendahnya produk dalam negeri dikaitkan dengan diberlakukannya AFTA 2004 telah mengakibatkan produk dalam negeri kita kalah bersaing, disisi lain adanya beberapa negara yang menerapkan standarisasi Internasional (ISO/Ekolabeling) mengakibatkan pasar ekspor berkurang sehingga merugikan pengusaha dalam negeri dan pendapatan devisa negara. Kerugian negara banyak juga ditimbulkan oleh meningkatnya penyelundupan dan pencurian kekayaan alam karena sulitnya pengawasan dan pengamanannya.

4) Sosial Budaya. Belum teratasinya masalah lemahnya SDM dan meningkatnya pengangguran serta terbatasnya

lapangan pekerjaan bahkan di beberapa daerah terjadi penyebaran penyakit, tingginya biaya kesehatan, Narkoba yang sudah merasuk ke generasi muda, kuatnya pengaruh negatif budaya asing, munculnya aliran-aliran sesat dan konsep pragmatis yang menafsirkan ajaran tertentu sehingga meresahkan masyarakat serta munculnya ideologi asing dan luntturnya rasa nasionalisme, aksi radikal dan anarkisme dijadikan model lapangan untuk menyampaikan pendapat, kriminalitas pun tak terelakan baik murni dari dalam negeri maupun pelibatan dengan kelompok Asing (Trans National Crime).

5) Pertahanan dan Keamanan. Luasnya wilayah Indonesia dan lemahnya alut serta minimalnya dukungan dana menjadikan penggunaan kekuatan unsur Hankam menjadi kurang optimal. Ancaman semakin nyata, terorisisme dapat bebas bergerak, LSM yang bermasalah dapat bebas membentuk Opini publik, daerah perbatasan semakin rawan, jalur ALKI dan lalu lintas selat Malaka serta keamanan dirgantara tidak dapat sepenuhnya terawasi oleh unsur-unsur Hankam. Kekuatan Indonesia terjepit diantara ambisi Australia untuk menguasai Asia Tenggara dan pembangunan kekuatan militer negara tetangga yang telah mengembangkan AMDA menjadi FPDA yang mampu mengontrol seluruh aktifitas di Asia Tenggara (bahkan sampai Asia Pasifik).

BAB IV

PENGARUH GLOBAL TERHADAP KONDISI KETAHANAN NASIONAL

15. **Umum.** Perlu hati-hati dalam menyikapi masalah Subversi, di era Globalisasi menjadikannya banyak akses yang dapat dimanfaatkan dan bersandar pada kuatnya tuntutan global seperti demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup. Seiring dengan kuatnya pengaruh negatif globalisasi yang berakibat bergesernya nilai-nilai budaya, ancaman Subversive semakin berpeluang dalam perekrutan kader dan aksi-aksi radikal sampai terror terbuka.

16. **Kapitalisme.** Perlu mengingat kembali, bagaimana Belanda dengan VOC-nya saat memulai masuk ke Nusantara dengan konsep perdagangan rempah-rempah yang kemudian menjajah dengan membangun pemerintahan Hindia Belanda selama 350 thn⁹. Perkembangan kapitalisme selanjutnya dengan tetap mengandalkan kekuatan militernya di era Globalisasi ini telah melahirkan bentuk baru dari paham Liberalisme melalui kekuatan ekonominya yang dikenal dengan Neo Liberalisme yang mengacu kepada filosofi politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik, paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas dengan pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak pribadi. Didalam kebijakan luar negeri, Neo liberalisme erat kaitanya dengan pembentukan pasar luar negeri melalui cara-cara politis,

⁹ W.L.Olthof. Babad Tanah Jawi. Narasi, 2007

menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi bahkan dengan intervensi militer, membuka pasar dengan merujuk pada pasar bebas. Neo liberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral melalui berbagai kartel pengelolaan moneter dan perdagangan seperti WTO, IMF dan Bank Dunia yang saat ini telah mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintah dalam suatu negara sampai pada titik minimum bahkan melalui pasar bebasnya telah berhasil menekan intervensi pemerintah serta berusaha keras untuk menolak atau mengurangi kebijakan hak-hak buruh seperti upah minimum dan hak-hak daya tawar kolektif lainnya. Dengan demikian maka jelaslah bahwa Neo Liberalisme bertolak belakang dengan Sosialisme, Proteksionisme dan Enviromentalisme. Secara domestik tidak serta merta langsung berlawanan secara prinsip tetapi menggunakan ini sebagai nilai tawar untuk membujuk negara lain untuk membuka pasarnya. Neo Liberalisme dalam terapannya akan menjadi rintangan bagi 'Perdagangan Adil' dan gerakan-gerakan yang menuntut hak-hak buruh dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi prioritas terbesar dalam hubungan internasional dan ekonomi. Dengan demikian munculah bentuk penjajahan baru kapitalisme di era globalisasi ini dengan wajah Neo Liberalisme, yang telah membuktikan keampuhannya di kedaulatan Republik Indonesia ini yang berdampak keruntuhan Orde baru serta ketergantungan ekonomi sampai sekarang serta perubahan pemikiran liberal yang masuk dikalangan cendekiawan muslim yang menghasilkan paham Pluralisme

17. **Komunisme.** Paham komunisme didalam menjaga eksistensinya telah beberapa kali mengadakan penyesuaian dengan dinamika lingkungan strategisnya. Negara Komunis RRC dengan sosialis demokratnya telah mampu menunjukkan sukses besar dengan startegi Gurita ekonominya bahkan prediksi ke depan akan tampil sebagai super power yang mampu menandingi kekuatan kapitalis khususnya militer Amerika Serikat dan sekutunya, kondisi ini telah terpantau oleh Amerika dan menjadikan bayangan serius dimana saat inipun Amerika sedang mengalami resesi di bidang politik. Melihat kekuatan ekonomi global telah bergeser ke barat dan menyadari terpuruknya ekonomi Uni Soviet dengan pejabat yang koruptis maka Negara Komunis terbesar ini melaksanakan reterpretasi (penafsiran kembali) dan purifikasi (pemurnian) dari ajaran ajaran Marxis-Leninismenya yang diawali oleh Mikhail Gorbachev membuka Glasnost dan Perestorika ¹⁰. Sekalipun berakibat pada keruntuhan dan peristiwa Balkanisasi, komunis sebagai ideologi tidak akan pernah hilang dan terbukti dengan kebangkitanya kembali. Saat ini Rusia telah bangkit kembali di bawah Presiden Putin telah mampu mengangkat kekuatan ekonominya menjadi nomor 8 peringkat dunia dan mengeluarkan pernyataannya akan tetap mengembangkan paham komunisme, membangun kembali kemampuan militernya, sebagai pewaris tunggal akan mengembalikan kejayaan Uni Soviet sebagaimana saat perang dingin dan kembali mengkritisi kebijakan-kebijakan Amerika dalam pengembangan Militernya¹¹.

¹⁰ Direktorat Khusus Lemhannas. Strategi Baru Komunis. Mabes ABRI .1990.

¹¹ Budi Suwarna. Rusia Bangkit Kembali.Pidato Putin, Konfrensi tahunan, Muenchen, Jerman 2007

Melihat kondisi Indonesia, Rusia kembali menawarkan bantuan militer dengan nilai tawar yang sangat ringan.

18. Muslim Radikal. Paradigma realisme politik yang meliputi kosmopolitanisme atau kapitalisme, modernisasi termasuk westernisasi dan demokratisasi merupakan kerangka tetap kepentingan nasional negara-negara barat. Namun sintesa dialektik berbagai konsep tentang kekuatan dan kepentingan tidak selalu mudah menghasilkan stabilitas paradigma, sehingga terjadilah Homogenisasi peradaban barat. Tetapi dalam kepentingan senantiasa membawa bayangan kekuatan, didalam konsep anarki masyarakat dunia, pelestarian hegemoni nilai, institusi dan gagasan barat membutuhkan dukungan kekuatan hegemonik. Amerika serikat mengawali konsep kekuatan hegemonik dengan revolusi persenjataan sehingga paradigma kapitalisme bertemu dengan perjalanan Imperialisme melalui penggunaan kekerasan dan suatu pembuktian bahwa Amerika Serikat dan sekutunya telah menggunakan kekuatan senjatanya di dalam melawan kekuatan Anti hegemoni, sehingga didalam dunia Islam pun merespon dengan munculnya Gerakan Islam Fundamentalisme yang bercirikan radikalisme untuk melawan kekuatan besar militer Amerika seperti Wahabby, Hammas, Hizbullah, Al-ikhwanul Muslim, Jamaah Islamiah, Hizbut Tahir al-Islami dan di dalam negeri Indonesia muncul Front Pembela Islam (FPI) sebagai reaksi atas maraknya kemaksiatan dan premanisme, Majelis Mujahidin Islam (MMI) tampil merespon kondisi ekonomi dan politik yang kian tak berdaya menghadapi tekanan kekuatan asing terutama Amerika Serikat, Hizbut Tahir Indonesia (HTI) merespon ketidakadilan

dalam tata hubungan antar bangsa yang semakin di dominasi oleh imperialisme Amerikat Serikat dan Laskar Jihad (LJ) yang lebih merupakan reaksi atas ketidak mampuan pemerintah pusat didalam mengatasi konflik di tingkat lokal. Sementara di lingkungan tokoh partai politik dan cendikiawan berkembang pemahaman tentang Plurlisme suatu dampak dari pemahaman Islam dari kacamata barat, dan beberapa kali telah berbenturan dengan Islam Fundamentalisme. Bahkan sesuatu yang sangat ironis para tokoh yang menjadi panutan masyarakat didalam dinamika politiknya pun telah berubah, NU mengidentifikasikan dirinya dengan PKB yang mengembangkan Pluralisme dan partai terbuka, Muhammadiyah para tokohnya banyak yang bergeser masuk PAN dan Golkar yang juga mengembangkan Pluralisme dan partai terbuka. Suatu potensi perpecahan di dalam gerakan Islam di tengah bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

19. Peluang dan Kendala. Hakekat misi subversi sebenarnya sangat otoriter, penentuan metodenya dipengaruhi oleh tinjauan lingkungan strategisnya/hubungan internasional sehingga menjadi variatif dan berubah lunak. Tapi tetap berpegang atas tujuannya. Bila situasi memungkinkan dalam pencapaian tujuan dan penyelesaian sasarannya tidak segan-segan melakukan invasi militernya. Maka pemahaman peluang dan kendala sebenarnya dapat di ciptakan oleh Aktor Subversi atau NGO-nya, dengan modus Ideologi atau sosial ekonominya.

a. Peluang.

- 1) Di era transparansi yang membuat seolah tidak ada lagi batasan wilayah suatu negara maka menjadikan sangat

efektif para aktor subversi untuk bermain jarak maya namun pada tahap pembentukan sel aktor harus turun ke lapangan karena pada hakekatnya untuk mencari pengaruh rakyat guna dimobilisasi dalam bentuk perlawanan rakyat, dengan demikian maka celah utama yang dicari untuk dieksploitasi adalah kelemahan-kelemahan aspek sosial dengan prioritas pada sesuatu yang dapat langsung bersentuhan dengan rakyat. Untuk memudahkannya agar terlindung dari kekuatan hukum dan bernaung dalam lindungan rakyat, biasanya mencari partai-partai besar kemudian masuk dan menempel yang selanjutnya menciptakan opini dan konflik. Upaya ini akan lebih cepat terakomodir manakala di lingkungan masyarakat mulai ada keredupan dan kurangnya gairah dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai ideologi bangsanya sendiri.

2) Dengan telah dicabutnya undang-undang No. 11/PnPs/1963 tentang Subversi, telah memberikan peluang kepada kelompok tertentu untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan subversi di Indonesia. Selain itu juga dengan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia dan makin banyaknya rakyat miskin serta tingginya jumlah pengangguran di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh kelompok subversi.

b. **Kendala.** Misi subversi akan terbendung oleh empat faktor :

- 1) Terhadap sasaran, hanya oleh suatu ketangguhan nilai-nilai ketahanan nasional. Karena rakyat yang akan dijadikan kekuatannya telah memiliki daya tangkal.
- 2) Hubungan Internasional. Kuatnya hubungan Internasional negara sasaran subversi akan melemahkan NGO, karena akan tersisih, terkucil dan membuat permusuhan lebih banyak dengan negara lain terutama bila negara sasaran mempunyai ikatan kuat dengan negara super power lainnya.
- 3) Kekuatan ekonomi yang dapat mengangkat tingkat kesejahteraan rakyatnya serta kemapanan pemerintah didalam menegakan hukum dan keadilan akan mempersulit ruang gerak subversi.
- 4) Pada era globalisasi saat ini pendekatan HAM, demokratisasi dan lingkungan hidup serta transparansi dan akuntabilitas telah menjadikan kendala bagi kelompok-kelompok tertentu dalam melaksanakan tindakan-tindakan subversi disuatu negara termasuk Indonesia.

BAB V
ANALISA POTENSI SUBVERSI
DALAM KONTEKS NILAI-NILAI KETAHANAN NASIONAL

20. **Umum.** Dengan memahami Teori Perang Subversi sebagai media analisis yang di hadapkan dengan keterpurukannya bangsa dalam waktu yang berkepanjangan, dipandang perlu untuk segera mencari akar permasalahan dan solusi pemecahannya. Dalam teori Global, seluruh negara selalu ingin hidup dengan menyejahterakan bangsanya oleh karenanya tidak lepas selalu pula ada kepentingan Nasional bangsa-bangsa yang tumpang tindih dalam suatu kawasan terutama yang memiliki letak geografis strategis dan berpotensi sumber kekayaan alam yang besar, sehingga timbul dalih-dalih pembenaran dengan niat untuk menguasai baik secara keras maupun lunak. Sesuai dengan pandangan Machiavelli dikatakan bahwa instrumen-instrumen kekuatan dalam bidang politik, ekonomi, psikologis dan militer merupakan bagian-bagian yang tak terpisahkan dan berhubungan erat sekali sebagai suatu keseluruhan sarana dalam perjuangan tunggal¹².

21. Analisis Indikasi Kegiatan Subversi dan Proses Pematangan

- a. **Di bidang Sosial Ekonomi.** Permasalahan Ekonomi merupakan hal yang sangat esensial karena berkait langsung dengan tuntutan hidup masyarakat sampai pada skala luas pelaksanaan pembangunan nasional sehingga celah kelemahan merupakan peluang bagi segala bentuk ancaman dalam

¹² Seskoad, Hahekat Ancaman 2005. Hanjar

mencapai tujuan, misinya terutama dalam membentuk opini dan aksi perlawanan rakyat. Gerakan front sosial ekonomi diawali dengan pembentukan kader kemudian masuk dan melekat pada badan-badan yang berkaitan dengan kontribusi perekonomian baik makro maupun mikro, setelah mendapat pengaruh membuat badan-badan bayangan yang bisa bergerak parallel dengan struktur pemerintah, kemudian dari peluang yang ada berupaya untuk membuat keadaan krisis ekonomi.

1) Identifikasi. Indonesia telah mengalami beberapa kali resesi ekonomi ditahun 1966, inflasi sampai 1000 % ekonomi kerakyatan saat itu hancur, setelah bangsa ini mampu menemukan akar permasalahan-hannya dan pemerintah tegas di dalam mengemban amanat rakyat dengan memberantas PKI sampai ke akarnya maka tidak terlalu lama bangsa ini bisa lepas dari belenggu resesi ekonomi dan bangkit mampu sejajar dengan bangsa lainnya. Suatu keberanian moral bangsa Indonesia sekalipun di balik PKI ada 2 kekuatan besar yaitu RRC dan Uni Soviet. Sekalipun resesi saat itu juga bersamaan dengan resesi dunia bisa dicermati, disaat ada gejolak kesulitan bahan pokok primer di masyarakat pasti timbul kecemasan politik terhadap pemerintah dan pembentukan opini di masyarakat, gerakan keduanya seolah simultan. Paham komunis masuk ke Indonesia melalui satu pintu partai yaitu Syarikat Islam (Partai terbesar disaat itu) yang merupakan pengembangan dari Serikat dagang Islam, saat itu begawan ekonomi memang berhimpun disitu untuk mengantisipasi persaingan dagang dan agama dengan orang

Cina serta monopolinya perdagangan penjajahan Belanda. Kecerdasan seorang HJFM Sneevliet (aktivis komunis dari Belanda) memanfaatkan aktivis Syarikat Islam sebagai kader-kader Komunisnya (Semaun, Darsono dan Tan Malaka) karena SI saat itu merupakan partai yang terbesar, sehingga SI pecah menjadi dua kemudian mendirikan ISDV tahun 1914, kemudian dibesarkan pada tahun 1920 menjadi Perserikatan Komunis, untuk selanjutnya pada tahun 1924 berubah menjadi "Partai Komunis Indonesia" dan setelah mendapat dukungan rakyat dari masa SI (Merah) kemudian berontak pertama kali tahun 1926. Kesimpulan, pada periode ini jelas ada pembentukan kader dan gerakan simultan antara front Sosial Ekonomi, politik dalam negeri dan psikologi. Selanjutnya dengan tetap memanfaatkan dinamika kondisi lingkungannya maka di kembangkan dengan berkali-kali melaksanakan upaya penggulingan pemerintahan secara revolusioner melalui pemberontakan Madiun affair dipimpin Muso tahun 1948, G 30S/PKI dipimpin Aidit tahun 1965, peristiwa Blitar Selatan dipimpin Sudisman tahun 1967 yang selalu diawali oleh kerusakan sektor ekonomi dan terbentuknya lingkungan masyarakat miskin, selain itu komunis dari daratan eropa (Belanda), Rusia dan RRC pun turut aktif berperan.

Disisi lain negara-negara kolonialisme-kapitalismepun turut aktif bermain dalam satu kubangan yang sama, Belanda melancarkan Agresi I & II, Andi Azis dan Westerling serta meninggalkan boneka RMS-OPM dan

senantiasa menghembuskan isu konflik yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian daerah maupun pusat serta kerawanan kondisi sosial lainnya. Amerika, secara tertutup memerankan CIA dalam aksi PRRI dan Permesta, selain bantuan militernya melalui Philipina dan Taiwan juga merusak perekonomian diantaranya pencetakan mata uang PRRI-Permesta, yang kemudian terungkap setelah tertangkapnya Alan Lawrence Pope, namun sampai saat ini niat penguasaan masih tetap ada diantaranya selalu ikut campur tentang pengamanan selat Malaka (Lintas ekonomi terbesar dunia), penentuan ALKI, kebijakan pasar bebas (Neo Liberalisme) serta pengelolaan sumber daya alam yang tertutup dan lain-lain. Inggris bermain ganda dengan memanfaatkan negara-negara persemak-murannya menerapkan pakta militer yang berdampak pada perekonomian, tidak mau melepaskan pengaruhnya di Semenanjung Selat Malaka, kapitalis berhasil menanamkan kepentingan nasionalnya secara lunak tetapi berdampak pada ketergantungan ekonomi dan keuangan negara, kerugian yang besar dan berkelanjutan merubah sistem dan kebijakan pemerintah kerana menghambat pelaksanaan pembangunan. Indonesia turut memprakarsai terbentuknya WTO, APEC dan AFTA namun Neo Liberalisme telah merusak karakter ekonomi dalam negeri sehingga kini didalam pelaksanaannya bangsa Indonesia merasa tertinggal dan belum siap dengan draft tuntutan pasar bebas, sehingga pemerintah mengambil langkah diplomasi untuk dapat

masuk dalam lingkaran ekonomi liberal yang selaras dengan kepentingan nasional.

Apa yang dapat diambil dari analisa tersebut? Pada era sebelum reformasi terulang kembali, muncul krisis multidimensi. Soliditas, Integritas nasional yang diharapkan dapat tampil sebagai daya tangkal dan motivator ternyata belum bisa menjawab tantangan dan ancamannya, sistem ekonomi dikuasai oleh blok kroni, banyak investor memindahkan sahamnya, nilai rupiah drastis jatuh, timbul kepanikan dan rakyat pun mudah digerakkan oleh provokator, bangsa kita nyaris terpecah, negara dalam keadaan chaos. Peran subversive tampak jelas diawali dengan rusaknya ekonomi.

Masuk pada era reformasi. Saat itu kondisi ekonomi sangat berpeluang untuk proses pematangan perebutan/ penggulingan Pemerintahan namun kekuatan hanya di imbangi oleh Front politik yang diprakarsai menonjol oleh peran Amien Rais, yang hanya dapat menggerakkan kekuatan mahasiswa dan sebagian masyarakat kota saja. Peran asing tampak jelas merusak perekonomian Indonesia baik perorangan seperti George Soros maupun NGO yang menggerakkan LSM-LSM yang kemudian menjadi kader-kader partai politik saat ini.

Pada era pasca Reformasi, sampai saat ini belum keluar dari belenggu Krisis Ekonomi yang bisa di dimanfaatkan oleh pihak lain. Hal yang sangat esensial belum tuntasnya kasus BLBI dan penentuan direktur BRI yang merupakan

barometer Keuangan Negara, campur tangan Parpol dalam pengelolaan BUMN, lepasnya kontrol MOU tentang CPO dan lain-lain serta sulitnya pemerintah untuk mengungkap korupsi akan tetap berdampak pada kerawanan dan potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku subversive untuk meruntuhkan perekonomian kembali baik dari dalam maupun luar. Atau dalam kondisi saat ini masih ada peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk menggoyahkan sektor perekonomian Indonesia.

2) Tinjauan dalam Spektrum Teori Perang. Subversi, Front sosial ekonomi saat pasca Reformasi telah masuk kepada tahap V (Krisis) sekarang berayun mengikuti derap kondisi lingkungan strategisnya berada pada tahap III, paralel atau melekat pada keadaan yang berlaku untuk menunggu proses pematangan atau stagnan sampai pada saat yang memungkinkan untuk mengimbangi front Politik Dalam dan Luar Negerinya. Dalam kondisi seperti ini para kader tetap membentuk jaring dan opini merongrong nilai-nilai ketahanan nasional khususnya disektor ekonomi baik makro maupun mikro, berkomunikasi dan menyusun strategi lanjutan. Indikasi ini dapat dicermati dalam setiap adanya perubahan kebijaksanaan ekonomi dan akan eksploif manakala kekuatan hukum melemah serta adanya imbalan dari front Subversive lainnya.

b. **Di bidang Politik Luar Negeri.** Di bentuk dengan harapan dapat membentuk opini dunia, membangun kekuatan dari luar dan merupakan sarana NGO untuk dapat mengontrol gerakan

dalam negeri. Ekskalasi bentuk kegiatannya diawali dengan membentuk kader yang kemudian melancarkan fitnah-fitnah terhadap pemerintahan yang sah kemudian berupaya mengisolasi agar negara sasaran tersisih dalam hubungan internasional, yang selanjutnya melancarkan tekanan-tekanan dan tuntutan yang berimbang dengan gerakan front politik dalam negeri, selanjutnya memberikan dukungan kekuatan politik dan militer setelah terbentuknya pemerintahan yang baru.

1) Identifikasi.

a) Betapa besar bantuan Amerika di dalam memerankan pemberontakan PRRI dan Permesta sehingga pemberontak berani melaksanakan "Operasi Djakarta I dan II", yang hanya karena ada kepentingan nasionalnya di Indonesia selain misinya saat itu untuk membendung komunisme yang kemudian malu kucing dengan terungkapnya agen CIA (Alan F Poppe). Tokoh Pimpinan Permesta HNV SUMUAL sampai saat ini masih aktif dalam organisasinya dan terakhir Organisasinya menyatakan pendapat "Minahasa akan lepas dari NKRI bila Indonesia memberlakukan Syariat Islam". Salah satu contoh lain efektifnya gerakan Hasan Tiro (GAM) dan Ramos Horta (Fretelin) sekalipun memakan waktu yang cukup lama dengan keberhasilan (Fitnah/propagandanya) mendapat dukungan Swedia dan hadiah Nobel maka melalui isolasi, tekanan danuntutannya lepaslah Timor Timur dan terjadilah MOU

Helsinki. Timor Leste kini mendapat bantuan dan dukungan kekuatan oleh NGO nya dan perjuangan GAM sekalipun dalam kondisi yang berbeda akan tetap eksis, suatu pembuktian tokoh Hasan Tiro dan kawan-kawan tetap belum mau kembali ke Tanah airnya. Akibat tekanan-tekanan luar negeri akhirnya Indonesia harus melepas Timor Timur dan juga harus merajut MOU dengan GAM yang berarti harus mengakui keberadaan GAM juga.

b) Gerakan tokoh PKI. Mencermati kronologis jalannya pembentukan para kader Subversive yang bergerak dari luar, aktif dalam gerakan yang kemudian memimpin partai komunisnya dan aktif pula sebagai pejabat pemerintahan yang notabene bertentangan dengan Faham ideologi yang dianut salah satu contoh adalah tokoh Amir Syarifudin yang sempat menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan sedangkan Muso sebagai tokoh polit biro PKI yang memproklamasikan "Soviet Republic Indonesia" pada 18 September 1948 di Madiun, kedua tokoh sebelumnya telah bermukim di Moskow selama 12 tahun. Setelah gerakan ini habis ditumpas oleh Kol AH Nasution ada beberapa kader mudanya melarikan diri ke luar negeri (ke NGO nya) seperti DN Aidit dan MH Lukman, yang kemudian 5 tahun berikutnya PKI berhasil melaksanakan konsolidasi dan ikut pemilu pada tahun 1955 dan tampil sebagai partai 4 besar setelah PNI, Masyumi dan NU.

Sepuluh tahun kemudian 1965 setelah merasa besar dan kuat, kembali berontak sekalipun gagal lagi. Dari rentang waktu dan konsepsi gerakan serta kondisi dalam negeri yang saat itu belum memiliki keuangan yang memadai, namun PKI dapat membiayai dan memperbesar partainya sehingga dapat dipastikan adanya campur tangan asing RRC dan Uni Soviet yang cukup besar terbukti memberikan bantuan alut sista kepada Indonesia dengan dua syarat yang diajukan Rusia kepada pemerintah RI, syarat pertama adalah pemerintah Indonesia agar tidak menghalangi serta memberi kebebasan dan melindungi PKI untuk mengembangkan partai tersebut, syarat kedua adalah menghendaki agar Indonesia memprakarsai pengusiran Inggris dan sekutunya yang diper-sonafikasikan sebagai Nekolim-NeoKolonialisme dari Malaysia dan Singapura.¹³ Kecerdikan komunis tampak ketika beberapa kali gagal dalam pemberontakan, mulai menyadari bahwa nama besar dan pengaruh kuat Bung Karno harus dihadapi dengan cara lunak. Akhirnya berhasil, Bung Karno mencanangkan Kebijakan Nasakom yang berarti komunisme secara sah diakui di Indonesia. Tekanan Politik luar negeri Komunis berhasil, saat itu Indonesia banyak mendapat bantuan militer dari Uni Soviet yang menjadikan angkatan perang Indonesia sebagai Militer terkuat di Asia tenggara tetapi terdikte oleh negara

¹³ Mayjen TNI (Purn) Syamsudin . Mengapa PKI Gagal

komunis sekalipun berpolitik bebas aktif. Ada tekanan dan tuntutan, keadaan menjadi berubah setelah runtuhnya Uni Soviet tetapi penyebaran komunis sebagai ideologi tetap eksis dengan menggunakan baju barunya sebagai Sosialis demokrat, inilah yang diemban oleh PRD, Papernas dan eks PKI yang akan eksis kembali. Sedangkan RRC tetap semakin kuat dengan gurita ekonominya yang diback up kekuatan militer yang semakin kuat dan modern yang pada akhirnya Indonesia-pun menjalin kerja sama selain di bidang ekonomi juga di bidang pertahanan. Kondisi ini secara tidak langsung telah mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan menghidupkan kembali budaya etnis Cina dan munculnya Parpol berasas sosialis.

c) Gerakan Muslim Radikal. Gerakan ini berawal murni dari kekecewaan akibat kebijakan politik dalam negeri Pemerintah RI disaat itu menjadi semakin memuncak manakala Pemerintah secara resmi membubarkan Masyumi (Majelis syuro muslimin Indonesia) dan PSI (Partai Sosialis Indonesia)¹⁴ yang kemudian gerakan DI/TII di Jawa Barat (Kortosuwirya) di DI/TII di Aceh (Daud Beureh) dan DI/TII di Sulawesi Selatan (Kahar Muzakkar) didalam gerakan ini tidak ada indikasi dukungan asing, namun setelah ditumpas oleh APRI kemudian bermetamorfosis menjadi gerakan kecil-kecil seperti Komando Jihad, warman dan lain-lain yang

¹⁴ Keppres No 200/thn1960 dan No 201/thn 1960 tgl 17 Agustus 1960

selanjutnya di Jawa barat muncul NII yang kadernya membentuk KW 9 Zyaitun di Jawa Barat dan JI (Jama'ah al Islamiyah) yang pindah berbasis di Malaysia, aktif menghimpun massa untuk ikuti perang di Afganistan yang kemudian disponsori oleh Terrorisme Internasional membagi wilayah Asean dan Australia menjadi 4 Mantiqi menggerakan kader-kadernya dalam berbagai kasus pengebomam di Indonesia. Sedangkan di Sulawesi Selatan juga muncul KPPSI (Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam) yang di pimpin oleh Azis Kahar Muzakkar yang di dalam kongresnya terakhir menuntut diberikannya otonomi khusus untuk bisa menerapkan syariat Islam atau Merdeka untuk Sulawesi Selatan dan kadernya (Agus Dwikarma) terlibat pengeboman di Ambon dan telah tertangkap di Philipina, sehingga aktifitas mereka pada akhirnya dapat diketahui di *back up* oleh Terorisme Internasional kelompok Abusayaf di Mindanao Philipina.

d) NGO Neo Liberalisme. Indonesia telah masuk dalam Multilateral Grouping di Asia Pasifik Regional (APR) yang meliputi APEC, EAS, ARF, EAC, sehingga di kawasan Asean terdapat tiga pilar antara lain: Asean Security Community, Asean Economic Community dan Asean Sosio Cultural Community, yang substansinya untuk menginteraksikan kepentingan nasional antar negara didalam mencapai tujuan nasionalnya berupa spektrum memberi dan menerima dari yang paling

positif dalam bentuk aliansi sampai yang paling negatif dalam bentuk Perang dengan tujuan didapatkannya keseimbangan yang dapat diterima antar negara tersebut. Dari keharmonisan ini seolah tidak ada celah untuk semua kegiatan subversi, namun dengan mencermati Geo Politik, Geo Strategi dan Ideologi masing-masing bangsa yang berbeda maka sejarah kembali telah membuktikan adanya variatif praktek penguasaan suatu negara terhadap negara lainnya yang sesuai dengan dinamika lingkungan strategis masing-masing. Pasca Perang dunia Ke II Komunis Internasional menerapkan melalui jalur Ideologi untuk menekan dan menuntun negara sasarannya, sedangkan negara Imperialisme menerapkan faham liberalismenya yang semuanya adalah sama untuk mencukupi kepentingan nasionalnya. Pasca Kemerdekaan RI komunis eksis melalui PKI nya dan Liberalis juga bermain ganda melalui PRRI-Permestanya, dan sekarang masing-masing ganti baju membawa pesan Demokrasi (Liberal dan Sosialis) dengan Neo Liberalisme sebagai kuda Troyanya. Dengan terapan pasar bebas pemerintah kini tertekan, matinya petani Tebu di Jawa Timur, sulitnya beras dan minyak tanah di daerah tertentu serta langka nya kedelai sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah harus melunakkan semua peraturan sampai pada titik nol dan memberikan kebebasan segala wujud yang berkaitan dengan sektor ekonomi. Sekalipun Indonesia secara perlahan telah lepas dari tuntutan HAM, Demokratisasi

dan Lingkungan hidup, kini berubah wujud dalam tekanan-tekanan ekonomi yang dapat menghambat pembangunan nasional serta keresahan masyarakat. Kondisi inilah yang memang diharapkan oleh NGO dalam upaya cipta kondisi untuk memberi peluang aksi subversinya.

2) Tinjauan dalam Spektrum Teori Perang Subversi. Dimasa kejayaan Uni Soviet dan sebelum pemberontakan G30S/PKI, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah terseret pada tekanan-tekanan politik luar negeri komunis Internasional pada tahap V berimbang dengan Front sosial ekonomi - Front Politik dalam Negeri - Front Psikologi. Dengan kegagalan PKI dan runtuhnya Uni Soviet, berayun sampai pasca reformasi saat ini front ini pun bergerak menyusut sampai tahap I, kader-kader masih tampak jelas dan tetap terpelihara. Negara Liberalis pun aktif menekan Pemerintah Indonesia melalui pemberontakan dalam negeri, sampai pada tingkat perlawanan militer/ perang terbatas, sejajar semua front pada tahap ke V sehingga Minahasa nyaris lepas dari NKRI namun APRI dengan Operasi Merdekanya dapat menumpas pemberontakan tersebut. Gerakan Muslim Radikal tidak memiliki front politik luar negeri namun pada konteks penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini, kondisi gerakan muslim radikal tersebut merupakan peluang yang baik untuk dimanfaatkan oleh aktor subversi lainnya sebagai akses pencapaian tujuan.

c. **Di bidang Politik Dalam Negeri.** Front inilah yang dipersiapkan untuk mampu mengambil alih kekuasaan, gerakannya diawali dengan pembentukan kader untuk membentuk satuan aksi front rakyat dan front persatuan yang kemudian setelah terbentuk pemerintahan baru dijadikan front nasional.

1) Identifikasi.

a) Mencermati gerakan Komunis. Dengan harapan untuk bisa mengambil alih kekuasaan maka Gerakan di front ini menjadi prioritas dan mengacu kepada format struktur dan kebijakan pemerintah, kader-kadernya biasanya juga disiapkan sebagai pimpinan partai atau pemerintah bayangan. Setelah NGO bisa mencetak kader-kadernya maka para kader akan menganalisa kondisi format politik biasanya akan menjadi benalu dulu di ormas/partai-partai besar dan badan-badan pemerintahan kemudian berupaya untuk bisa menjadi pimpinannya dan seterusnya setelah mampu membentuk opini, dilanjutkan menghimpun kekuatan rakyat, yang kemudian membentuk satuan satuan aksi untuk mampu bangkit secara sporadis, PKI menerapkan ini melalui Wanita(Gerwani), pemuda (Pemuda Rakyat), Buruh (SOBSI), Petani (BTI), Mahasiswa (CGMI), Seniman dan budayawan (Lekra), Media Cetak (Harian Rakyat) dan sel-sel dalam militer seperti Suparjo dan Latief. Kekuatan ini dihimpun dijadikan satu kesatuan perjuangan menjadi front rakyat yang dibentuk untuk vokal

membawa pesan-pesan Sponsor/NGO nya. PKI menerapkan metode ini dengan sukses sebagai peringkat IV dalam Pemilu 1955, dan sebagai partai komunis terbesar di Asia, perjuangannya berlanjut sampai mampu mempengaruhi kebijakan politik Presiden Soekarno dengan menerapkan "NASAKOM" (Nasionalis, Agama dan Komunisme). Seperti inilah kembali terjadi di pasca reformasi entah disadari atau tidak para politikus perwakilan rakyatpun menyetujui adanya parpol yang berazaskan syariat Islam seperti Bulan Bintang dan Sosialis Demokrat (Gorbacevis) seperti PRD beserta ormas underbounya (SMID, PPBI, STN, JAKER, SRDJ dan SRS) yang kemudian direspon oleh eks anggota PKI yang berupaya bangkit kembali melalui PAPERNAS, PAKORBA Di dalam perjuangan PKI, front rakyat ini dihimbau untuk mau melihat dan mengkritisi kondisi nasional yang rusak, setelah terbentuk opini sesuai dengan misi perjuangannya maka disatukanlah front Rakyat itu menjadi satu kekuatan yaitu front Kesatuan yang kelak pada tahap akhir akan menjadi front Nasional. Namun menuju ketahap terakhir ini gagal pada aksi G30S/PKI-nya. Di era pasca reformasi oleh NGO melalui LSM dan kader pilihannya, gerakan ini diulang kembali tetapi kesiapan dan pematangannya tidak sebaik PKI tempo dulu. Aktifitas PAPERNAS dan PRD disambut keras oleh Pemuda Panca Marga, FAKI, PERMAK, PERSIS, GNPI, SP-KGB, FPI, FBR. Yang ahirnya bisa dicermati tokoh-tokoh muda sosialis

demokrat tersebut kembali sembunyi sebagai benalu di partai besar, seperti Budiman Sujatmiko masuk sebagai anggota PDIP. Karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan maka aktifitas kader di front politik dalam negeri kembali ke tahap I. Mereka tidak jauh pergi, menunggu pesan sponsor dan situasi yang lebih baik lagi, tetapi senantiasa tetap bersikap simpatik untuk menanamkan pengaruhnya pada lingkungan yang baru dan diterima dengan baik. Disebabkan karena situasi hukum saat ini yang menguntungkan baginya maka misinya tetap bergerak walaupun sangat perlahan. Gerakan-gerakan peroranganpun dapat di ketahui dari mereka yang telah dimanfaatkan oleh LSM-LSM yang pro kiri seperti Munir, Diah Pitaloka, Ribkka Ciptaning. Di badan parlemenpun tepantau tersusupi aktifitas tersebut terindikasi adanya upaya untuk mengamandemen kembali UUD 1945, sulitnya perancangan UU Keamanan Nasional dan UU Subversi yang baru. Dengan demikian dapat diketahui ada kepentingan pihak lain untuk merubah sistem ketatanegaraan Indonesia.

b) Mencermati Gerakan Muslim Radikal. Gerakan gerakan Islam sudah banyak muncul di awal perjuangan kemerdekaan NKRI, berawal dari misi persaingan dagang dengan etnis China dan Belanda serta syiar Islam, kemudian menjadi partai politik (SI) setelah tersusupi faham Sosialisme, di pasca kemerdekaan

menjadi Partai Masyumi yang memperjuangkan Piagam Jakarta sebagai dasar negara, karena kader-kadernya banyak yang memprakarsai pemberontakan maka Masyumi di bubarkan oleh Bung Karno, namun perjuangan ideologi tak kunjung padam, bermetamorfosis menjadi berbagai gerakan politik (Parpol dan Ormas) dan pemberontakan (DI/TII) yang pada akhirnya baru pada pasca reformasi terpantau adanya keterlibatan salah satu gerakannya (JI) pada pasca reformasi terlibat dalam konspirasi Terrorisme Internasional, sehingga memberi peluang bagi Amerika dan sekutunya yang menyatakan perang melawan Terrorisme untuk mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Di sisi lain transfer ideologi dalam globalisasipun telah membentuk karakter pribadi muslim Indonesia menjadi Muslim Radikal (Fundamentalis) dan Pluralisme yang masing-masing memiliki hubungan dengan organisasi asing diluar bingkai NKRI, Muslim Radikal di motori kelompok garis keras seperti Front Pembela Islam (FPI) yang muncul sebagai reaksi atas maraknya kemaksiatan dan premanisme yang makin tak terjangkau oleh hukum, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) tampil untuk merespon kondisi ekonomi dan politik yang makin tak berdaya menghadapi tekanan asing/Amerika, Hizbut Tahir (HT) merespon ketidakadilan tata hubungan antar bangsa yang semakin di dominasi Imperialisme Amerika dan Laskar Jihad (JI) suatu reaksi atas ketidak mampuan pemerintah pusat

mengatasi konflik ditingkat lokal. Muslim Radikal ini memiliki hubungan emosional yang sangat erat dengan kelompok-kelompok Radikalisme di Timur Tengah yang keras menentang kebijakan Amerika di dunia. Tekanan terhadap pemerintah RI masih dalam katagori lunak, aspirasi politiknya tersalurkan melalui parpol Islam khususnya PBB dan PKS yang tetap konsisten memperjuangkan pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia.

c) Kelompok Moderat-Liberalisme. Kelompok ini merasa sebagai pelopor gerakan reformasi, para tokohnya juga banyak sebagai pemimpin partai politik, pasca reformasi kembali vokal dengan menyampaikan idea tentang perubahan bentuk negara menjadi negara Federal, dengan demikian dapat di pastikan bahwa faham yang dianutnya sama dengan pendahulunya yang telah berhasil memperjuangkan perubahan bentuk negara kesatuan menjadi Republik Indonesia Serikat, upaya politis dapat diredam dengan diterbitkannya UU tentang Otonomi daerah. Idealisme tokoh religius menginspirasi publik dengan wacana para tokohnya mengembangkan faham pluralisme seperti Gus Dur, Nur Kholismajid, gerakan pluralisme ini dapat dicermati dimana NU yang mengidentifikasikan diri dengan PKB dipimpin Gus Dur mengembangkan partai yang terbuka, Muhammadiyah para tokohnya banyak di PAN dan Golkar yang juga membawa partainya untuk terbuka.

Hubungan keluar negeri banyak menggunakan LSM-LSM yang bebas bergerak di Tanah Air ini. Mengingat mayoritas penduduk NKRI ini beragama Islam maka akan menjadikan suatu potensi konflik yang besar bila Pluralisme ini berbenturan dengan Muslim Radikal (di beberapa tempat sudah terjadi).

3) Tinjauan dalam Spektrum Teori Perang Subversi. Gerakan dalam Front ini di era PKI, ber-eskalasi sampai tahap V berimbang dengan front sosial ekonomi, front politik luar negeri dan front psikologi, gerakan G30S/PKI hampir sukses. Bisa berhasil dengan baik bila di imbangi pula dengan Front Militer/keamanan, perhitungan akan tepat bila bisa menguasai militer-TNI. Masuk ke era Reformasi terjadi sinkronisasi gerakan penentang pemerintahan, eskalasi sampai tahap V berimbang dengan front Psikologi dan Sosial Ekonomi dimana saat itu terjadi krisis multi dimensial tetapi tidak memiliki front Militer sehingga pemerintahan yang baru masih diwarnai oleh kebijakan lama. Kuatnya kontrol TNI maka NKRI masih tetap utuh, di pasca reformasi akhirnya muncul berbagai tanggapan dan pernyataan politik yang mengkritisi pemerintahan bahkan Ideologi negara dan front ini pun kembali ke tahap I dimana para kader masih tetap eksis dan tidak tersentuh hukum.

d. **Di bidang Keamanan/Militer.** Front ini meliputi tahap pembentukan kader, mengeluarkan ancaman, membentuk kekuatan, melancarkan perang gerilya, melaksanakan perang

terbatas dan mengamankan pemerintahan baru. Satu-satunya Kekuatan Militer yang membayangi NKRI sampai saat ini adalah Amerika dan sekutunya. Sejak lahirnya NKRI selalu padat dengan aktifitas Subversi dan kehadiran kekuatan militer asing, Belanda berniat kembali menguasai dengan aksi Agresi Militer I dan II serta menciptakan pemberontakan Andi Azis, Westerling serta negara Boneka RMS. Komunis Internasional (USSR dan RRC) mempersenjatai buruh tani dan muncul beberapa kali pemberontakkan komunis, Amerika dan sekutunya menyediakan wilayah negaranya sebagai daerah persiapan militer dan mendukung penuh aksi pemberontakan PRRI dan Permesta hingga sampai saat ini masih memelihara pangkalan logistik militernya di Singapore, Inggris sekutu Amerika telah mengawali menggelar AMDA (Anglo Malayan Defence Agreement) pada tahun 1957 yang kemudian menjadi FPDA (Five Defence Arrangement) dengan gelar IADS (Integrated Air Defence System) yang mampu mengontrol dinamika Strategi kawasan Asia tenggara¹⁵. Sementara juga ada subversi dalam negeri yang di gerakan oleh Muslim Radikal dengan pemberontakan DI/TII yang kemudian masih tetap eksis dengan perjuangannya untuk memberlakukannya Syariat Islam.

- 1) Identifikasi.
 - a) Subversi Komunis dan Liberalisme. Era Gerakan PKI sekalipun telah beberapa kali melaksanakan

¹⁵[Http://bagy.anugraha.wordpress.com/2007/06/06-Energy Security and DCA - Singapura- Ind..16/06/2007](http://bagy.anugraha.wordpress.com/2007/06/06-Energy-Security-and-DCA-Singapura-Ind..16/06/2007).

pemberontakan, kebangkitan PKI untuk memulai berani memberontak lagi setelah adanya dukungan dari RRC tentang pembentukan anagkatan ke V buruh tani dipersenjatai, Inilah yang dijadikannya kekuatan front militer, terakhir diketahui bahwa basis daerah pangkal perlawanannya di daerah Blitar selatan. Kegagalannya adalah salah perhitungan dan belum matang/siap untuk melaksanakan perang terbatas. Front militernya hanya mampu untuk melaksanakan aksi perang gerilya karena beberapa pengalamannya dari era revolusi. NGO tidak mampu bermanuver karena terhalang oleh strategi Negara Kapitalis (Amerika dan sekutu) yang melalui AMDA telah menguasai dan menduduki kawasan Asia Tenggara. Tetapi setelah terungkapnya kasus Allan F Poppe agen CIA dengan No kode 11, Amerika baru merasa malu karena terbukti daerah persiapan militer untuk mendukung pemberontakan ada di Singapore, Philipina, Taiwan dan Australia¹⁶, sehingga Permesta berani mengawali operasi militernya dengan sandi "Operasi Djakarta satu dan Operasi Djakarta dua" dengan maksud merebut Indonesia bagian Timur kemudian merebut Ibu Kota RI Jakarta (tidak ke bagian Barat karena wilayah PRRI)¹⁷. Komunis Internasional ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Komunis sedangkan Amerika berdalih untuk membendung aksi komunisme dunia.

¹⁶ Indra J.Piliang. Peneliti Politik dan perubahan Sosial.. CSIS,14 Agustus 2002

¹⁷Permesta Information Online Dokumen Permesta. 2005

- b) Subversi Gerakan Muslim Radikal. Berawal dari kekecewaan Politik saja, beberapa kali aksinya untuk mendirikan negara Islam dengan melancarkan aksi pemberontakan bersenjata tanpa bersandar pada bantuan kekuatan militer asing namun pasca reformasi baru terungkap adanya organisasi (JI) yang pernah terinspirasi DI/TII Jawa Barat, beraliansi dengan Terrorisme Internasional, mengirim kadernya ke basis latihan di Towrkham, Afganistan dan Mindanao Philipina, melancarkan aksi terror Bom di wilayah Indonesia yang bisa dijadikan argumentasi Amerika dan sekutunya mengerahkan kekuatan militernya masuk wilayah Indonesia, sedangkan DI/TII-Aceh setelah turunnya Daud Beureh, misi gerakan dilanjutkan oleh GAM dipimpin Hasan Tiro, membangun gerakan sparatis dan hubungan erat dengan kekuatan luar negerinya sekalipun telah terajut didalam MOU Helsinki.
- c) Gerakan Separatisme. Perlu pemilahan antara GAM, RMS, OPM dan Fretelin di Timor Timur (disaat itu).

(1) GAM dan Fretelin. Menonjol menggunakan prioritas gerakannya pada front Militer dan politik luar negeri. Sekalipun kekuatan militernya mampu tampil sampai perang gerilya dan dapat di redam TNI, namun ketajaman manuver front luar negrinya tak terbandung. Keberhasilan Ramos Horta dan Uskup Belo mendapat Nobel dan tampilan karismatik Xanana dalam penjara memperkuat front militernya

sehingga mengantar pada proses kemerdekaan Timor Leste. Sedangkan GAM tetap mempertahankan eksistensi Front Militernya yang di back up front Politik Luar Negrinya sehingga keberhasilannya mengalang MOU Helsinki, apapun bunyi perjanjian tersebut suatu pembuktian eksistensi perjuangannya tetap terwadahi dalam konteks dinamika politik saat ini.

(2) RMS dan OPM. Front militer pernah men jadikan titik berat gerakannya dan mampu sampai tingkat perang gerilya (OPM) dan pembentukan kekuatan (RMS), setelah dapat diredam TNI, gerakan menurunkan ekskalasinya dan beralih pada front politik dalam dan luar negeri.

(3) Radikalisme pasca Reformasi. Aksi radikalisme yang terjadi di pasca reformasi merupakan suasana yang turut mempercepat runtuhnya penguasaan pemerintah orde baru disaat itu. Memang di dalam negeri tidak ada tanda-tanda kehadiran kekuatan militer asing, tetapi di kawasan regional Asia Tenggara telah padat dalam bayangan pengawasan kekuatan militer Inggris dan Amerika melalui AFDA yang mengembangkan IADS, serta imbalanced gelar kekuatan militer Australia dalam program AUS AID membangun pangkalan militer di Thursday Island dekat Merauke, Pusdiklat di Cairns, Shuttle Space di P.Cristmas di selatan Cilacap serta pembaruan alut

sista secara besar-besaran setelah mengetahui adanya kerja sama di bidang Hankam antara Pemerintah RI dengan RRC. Sehingga dengan bayangan kekuatan militer ini akan mempengaruhi dinamika kawasan.

2) Tinjauan Spektrum Teori Perang Subversi. Di era Globalisasi dan kuatnya peran hukum front Militer tidak perlu harus hadir kedalam negeri, bayangan kekuatannya saja dan imbalan tekanan dan tuntutan dari front Politik luar negerinya sudah cukup untuk membuat jera negara sasarannya, bila propaganda ini tidak dihiraukan oleh negara sasaran maka negara super power yang memiliki hak Veto akan memanfaatkan PBB untuk memulai melaksanakan operasi militernya, inilah yang terjadi dengan Irak, Afganistan, Columbia.

e. **Di Front Psikologi.** Front Psikologi tidak berdiri sendiri, melainkan erat seiring dengan front lainnya karena harus tepat dalam menentukan tema di dalam membentuk opini dalam setiap tahap gerakan masing-masing front tersebut. Tahapan front psikologi dimulai dengan pembentukan kader aksi unjuk rasa, aksi anarkis, melaksanakan terror dan merubah arah sesuai kebijakan pemerintah baru. Ulasan hasil karnya front ini antara lain sebagai berikut:

1) Gerakan komunis. Keberhasilan komunis internasional dalam menyekam ideologi bangsa Indonesia telah terbukti dengan kuatnya partai komunis disaat itu (merupakan partai komunis terbesar di Asia), dengan praktek pemberontakannya yang berkali-kali gagal namun tetap

terus bangkit lagi berjuang dengan di bantu kekuatan rakyat yang cukup besar. Pemerintahan disaat itupun seolah tak berdaya dengan tekanan psikologinya sehingga mencanangkan kebijakan politik NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunis), yang kemudian menyusul agitasi politik untuk merebut Malaysia. Politik Nasakom mendapat respon dengan munculnya pemberontakan anti komunis (PRRI dan Permesta), agitasi politik PKI semakin kuat, merangkul Presiden dan para kadernya pun telah menduduki jabatan-jabatan strategis. Ambisi PKI semakin menjadi untuk mempersenjatai Buruh & Tani walaupun ditentang habis oleh TNI, anti klimaks agitasi politiknya pada aksi G30S/PKI.

Sekalipun pemberontakan PKI Gagal, ideologi komunis tetap berkembang, pasca reformasi yang sarat dengan kebebasan dan kelemahan hukum, muncul sporadis LSM dan aksi-aksi yang berazaskan sosialis demokrat (Gorbachevis) seperti PRD beserta ormas Underbouwnya (SMID, PPBI, STN, JAKER, SRDJ dan SRS) yang kemudian direspon oleh eks anggota PKI yang berupaya bangkit kembali melalui PAPERNAS, PAKORBA yang sekarang kurang menarik minat masyarakat kembali mempengaruhi partai-partai besar seperti Pimpinan PRD masuk sebagai anggota PDI-P akan kembali membentuk opini dari dalam seperti apa yang pernah dilaksanakan oleh pendirinya Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet yang mempengaruhi Syarekat Islam (SI) hingga pecah jadi dua

yaitu SI Merah yang Marxis dan SI Putih yang menentang Marxis. Kemudian menghasut SI Merah untuk berontak pada tahun 1926 di empat wilayah, Jakarta, Priangan, Surakarta dan Silungkang Sumatra Barat.

2) Gerakan Liberalisme.

a) Mengembangkan tekanan psikologi massa yang merupakan dampak dari depresi Neo Liberalisme, seperti keresahan kebutuhan primer masyarakat, daya saing produksi sampai pada masalah moneter dengan penguasaan badan-badan Internasional sehingga Negara akan semakin ketergantungan oleh aktor tertentu.

b) Mempolarisasikan pemikiran Religius. Memberangus cara berfikir Paternalis untuk bisa lebih lepas dengan konsep pemikiran masing-masing yang kemudian dikelompokan sehingga akan timbul potensi perpecahan, suatau analog munculnya berbagai macam aliran sesat serta cara pandang cendikiawan dalam memahami keyakinannya seperti Pluralisme dan Fundamentalisme yang menjadi dua kutub perbedaan.

c) Mengembangkan kecerdasan, kepekaan dan ketajaman daya kritisi yang tinggi, yang seolah merupakan icon generasi muda dalam reformasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk saling kritik oto kritik khususnya pada tataran kebijaksanaan pemerintah agar dapat respon dari rakyat guna pembentukan opini lanjutan gerakan subversinya, metode ini telah diterapkan pada mimbar-

mimbar bebas baik dilingkungan kampus maupun untuk umum seperti kasus penyerangan Kantor PDIP dan saat ini mulai membudaya kembali di Media cetak maupun maya. Bahkan dilaksanakan oleh para tokoh pimpinan Parpol maupun ormasnya.

22. Analisis Pembatasan Subversi. Kegiatan Subversive akan memanfaatkan segala macam bentuk akses yang memungkinkan untuk dapat masuk dan menyentuh sendi kehidupan masyarakat, dengan pemahaman bahwa suatu ideologie itu tidak akan pernah bisa hilang maka pemerintah telah berupaya seminimal mungkin membatasi penyebaran pengaruhnya. Pemerintah berupaya membendung dan memberantas dengan memberlakukan undang-undang serta membentengi Ideologi Pancasila dengan tinjauan sebagai berikut :

a. Melalui Format Hukum.

1) Era pemberlakuannya UU No 11/PnPs/thn 1963 tentang Pemberantasan kegiatan Subversi. Di dalam UU ini mempunyai rumusan dan batasan-batasan yang sama dengan Doktrin Intelijen, dapat menentukan dan menemukan ciri khas Subversi serta ketegasan bertindak dari para aparat di dalam mengantisipasi dan mencegah kegiatan Subversive, sistem yang ada menjadi sangat responsif menjamin stabilitas keamanan wilayah, teror yang merupakan suatu metode dalam kegiatan subversive disaat itupun sulit diterapkan dan dapat diredam sehingga pemerintah dapat mengendalikan ketertiban dan keamanan negara dengan baik, menjamin suksesnya pembangunan di

era Presiden Soeharto, secara hukum aktivitas subversi tidak dapat berkembang, secara kualitas nilai-nilai Ideologi negara Pancasila terserap melalui P4 dan diamankan melalui Kewaspadaan Nasional, ideologi komunis memang tidak dapat berkulit bahkan dapat dikatakan tertekan sampai titik nol. Melalui Bakorstanas sampai ke daerah digelar posko-posko Kewaspadaan, terjadi sinkronisasi dan keterpaduan didalam setiap kegiatan dan penyelesaian masalah, pemerintah seolah benar-benar dapat mengendalikan dinamika kondisi sosial di masyarakat, ada dasar hukum bagi aparat untuk bertindak secara fungsional maupun terpadu, konsepsi inilah yang mengantarkan suksesnya Pembangunan Nasional disaat itu dan melanggengkan Pemerintahan Presiden Soeharto selama 32 tahun.

2) Pasca Pencabutan UU Subversi. UU Subversi dicabut melalui penetapan UU RI No 26 tahun 1999. kemudian diberlakukan UU RI No 27 tahun 1999 tentang kejahatan terhadap keamanan Negara yang merupakan perubahan KUHP, dengan menambahkan 6 ketentuan baru diantara pasal 107 dan 108 tentang larangan penyebaran dan pengembangan ajaran Komunis serta Sabotase. Alasan pencabutan karena adanya rekomendasi dari Komnas HAM yang telah melaksanakan pengkajian lebih satu tahun yang menyatakan UU Subversi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, politik hukum yang menjadi landasan UU Subversi bertentangan dengan politik hukum sekarang ini dan bertentangan dengan aspirasi masyarakat yang

berkembang, bertentangan dengan norma-norma tentang penghormatan hak azasi manusia yang universal, sifat UU Subversi terlalu luas dan lentur sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, aparat bisa secara subyektif menafsirkan sebuah perbuatan sebagai tindakan Subversive. Saat diberlakukan mulai 19 Mei 1999 mengundang pro dan kontra, tokoh-tokoh yang mengerti tentang bahanya ancaman subversi keras memperjuangkan diberlakukannya kembali atau perlu adanya UU pengganti Subversi. Situasi pasca reformasi menjadi tidak kondusif, banyak tapol/napol dibebaskan kembali, kritik oto kritik menjadi budaya masyarakat, penyampaian aspirasi di lapangan menjadi model, tindakan semakin berani dan tidak bermoral, aksi masa semakin brutal dan anarkis yang akhirnya timbul model aksi bom dan terrorisme. Menyikapi kondisi tersebut maka keluarlah UU RI No 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana Terrorisme, sekalipun demikian kondisi nyata aparat dilapangan tetap tidak dapat bekerja secara optimal terutama dalam pemanfaatan satuan Intelijen dan TNI dalam penggulangan Terrorisme. Sampai saat ini kompleksitas permasalahan semakin berkembang sehingga tersentuhlah gagasan untuk menerbitkan UU Keamanan Nasional, namun setelah wacana ini bergulir baru disadari bersama bahwa sangat ironis diantara himpitan ancaman dan kompleksitas permasalahan bangsa seperti ini, elemen-elemen bangsa belum ada kesetaraan dalam memahami masalah keamanan nasional sehingga wacana UU-nya pun terbentur dalam persepsi yang berbeda. Suatu

kondisi yang dapat diduga adanya gerakan tertutup yang sudah berada dilingkaran dalam.

b. **Melalui Format Penyadaran.** Mengamankan dari ancaman subversi diantaranya juga dipandang perlu untuk membentengi Ideologi Bangsa, maka telah diterapkan penyadaran masyarakat, namun perlu juga ditinjau kembali keabsahannya apakah benar-benar upaya tersebut demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia atau semata demi kelanggengan kekuasaan pemerintah. Disebabkan adanya ambisi politik dan penyadaran yang berlebihan maka munculah kecenderungan penyimpangan sebagai berikut :

1) Di era Orde Lama. Diawal kemerdekaan dimana negara baru memiliki format dasar negara Pancasila dan Konstitusi UUD 1945, kedaulatan NKRI sudah mulai diganggu dengan upaya Belanda untuk menduduki kembali Indonesia. Kegiatan subversi PKI pun terulang ke dua kalinya melalui pemberontakan Madiun 1948 yang memproklamasikan "Soviet Republik Indonesia". Kemudian disusul pemberontakan lain yang berazas syariat Islam dan Nasionalisme seperti DI/TII dan PRRI/Permesta sehingga bentuk negara saat itu sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, mewadahi semua tersebut Bung Karno yang Marhaenis menafsirkan demokrasi Pancasila dalam kebijaksanaan politiknya membentuk NASAKOM yang terkesan melanggengkan kekuasaannya yang akhirnya benturan dengan Ideologi Pancasila dan meruntuhkan kekuasaannya sendiri.

2) Diera Orde Baru. Dibawah bayang-bayang ancaman subversi komunis dan liberalisme barat, dipandang penting dan sebagai prioritas adalah faktor keamanan dalam menunjang pembangunan nasional serta mencegah disintegrasi bangsa, maka diperlukan kesamaan visi dalam memahami dan menghayati Ideologi Pancasila. Maka dibentuklah format secara struktural dan kultural melalui BP7 dengan program “P4” nya. Selanjutnya untuk mewaspadaai ancaman dan pengamanannya diterapkan melalui “Kewadapadaan Nasional “. Disaat itu kesadaran masyarakat menjadi sangat kuat dan militan bahkan terjadi pengsakralan Pancasila yang ditentang keras oleh kaum Religius, namun dinamika politik menjadikan semua berubah arah, karena ada pemanfaatan pelanggaran kekuasaan akhirnya muncul gerakan reformasi yang memaksa dan meruntuhkan kekuasaan pemerintah Orde Baru serta disaat itu nyaris terjadinya disintegrasi bangsa.

3) Pasca Reformasi. Orang mulai skeptis terhadap Pancasila terutama kelompok mahasiswa dan ormasnya, seolah warisan orde baru, nilai budaya bangsa bergeser, penyampaian pendapat dijalanan dengan aksi radikal dan anarkhis dinilai lebih efektif dan dijadikan model, tokoh-tokoh kebangsaan dinilai kurang bermanfaat, masa lebih suka melihat tokoh reformis yang mampu berbicara membuka kejelekan pemerintah dan mengumbar janji-janji tentang harapan baru yang lebih baik. Mencermati kondisi sosial bangsa ini pemerintah membentuk tim sosialisasi

wawasan kebangsaan yang langsung dibawah koordinator Wakil Presiden RI dengan menggunakan 11 Model materi tentang sosialisasi wawasan kebangsaan yang hingga kinipun efektifitasnya kurang memadai karena tidak terdukung oleh struktur yang bisa menjangkau masyarakat paling bawah. Semangat nasionalisme semakin meredup sekalipun pimpinan nasional selalu mengingatkan tentang semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

22. Kesimpulan Analisis dan Tinjauan Pematangan Gerakan Subversi. Persaingan global telah terjadi, kebutuhan energi menjadi kepentingan yang urgen bagi semua negara di dunia. Tergelarnya hubungan internasional menjadikan strategi penguasaan antar negara, suatu konsekuensi logis bila ada suatu negara yang memiliki potensi sumber kekayaan alam menjadi ajang rebutan bagi negara-negara dunia terutama yang merasa memiliki keunggulan angkatan bersenjata dan ekonomi negaranya. Geo Politik dan Geo Strategi akan mewarnai karakter suatu bangsa. Didalam tehnik penguasaan untuk mencukupi kepentingan nasionalnya maka akan terimplementasilah ideologi suatu bangsa sebagai penguasa, sehingga akan terjadi keniscayaan subversi, sekalipun dalam bentuk yang sangat lunak. Peran penguasaan dapat dibedakan antara Actor State (Oleh suatu Negara karena kepentingan nasionalnya) dan oleh Actor Person (Oleh Perorangan karena kepentingan individu).

a. **Versi Komunisme dan Liberalisme.** Dengan baju barunya, Sosialis Demokrat dan Neo Liberalisme, masing-masing dapat memanfaatkan ketiga celah yang ada, mengimplementasikan

pada setiap Bentuk Front Subversi karena pada setiap tahapnya telah memiliki potensi yang dapat di aktifkan. Membangun kader baru melalui organisasi partai politik baik yang nasionalis maupun religius, atau melalui ormas-ormas bentukan para mantan pemberontak yang sudah memiliki kekuatan massa. Upaya perusakan Ideologipun tidak terlalu sulit karena dari pasca Reformasi hingga saat ini belum tertata dengan baik upaya untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme dan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai perekat jiwa kesatuan dan persatuan bangsa.

b. **Versi Muslim Radikal.** Memiliki cukup peluang karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan memiliki hubungan emosional dengan gerakan yang serupa di Timur Tengah namun didalam implementasi kegiatannya akan berbenturan dengan kelompok Pluralisme dan Liberalisme dimana para tokoh faham ini pun juga banyak sebagai pemimpin Partai Islam dan Organisasi Islam terbesar di Indonesia, sekalipun demikian dalam strategi jangka panjang masih ada peluang dan titik temu yang sama dalam satu harapan tegaknya Syariat Islam.

BAB VI
PENUTUP

23. Kesimpulan.

- a. Kepentingan Nasional menjadikan modus suatu negara untuk menguasai Negara lain yang dapat berkembang menjadi Subversi/ penggulingan pemerintahan yang sah. Konstelasi Nusantara yang kaya dengan sumber kekayaan alamnya menjadi penarik minat kepentingan nasional negara lain sehingga wilayah NKRI menjadi wadah aktifitas subversi dari berbagai faham ideologi.
- b. Dari bentuk kegiatannya subversi dapat di bedakan sebagai berikut, dari luarnegeri, Komunis menggunakan peran NGO menerapkan berdasarkan Ideologinya sedangkan Liberalisme menerapkan berdasarkan kepentingan Nasional bangsanya melalui bayangan kekuatan militernya sehingga perlu membangun pakta-pakta pertahanan, sedangkan dari dalam negeri timbul subversi umumnya disebabkan karena kekecewaan politik yang dapat memuncak dalam bentuk pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Umumnya subversi dari luar selalu memanfaatkan potensi konflik dalam negeri yang ditimbulkan oleh subversi dalam negeri.
- c. Subversi luar negeri tidak selamanya bergantung pada potensi konflik dalam negeri, dalam era globalisasi ini masing-masing telah menyesuaikan dengan keadaan strategisnya,

komunis Internasional menerapkan sosialisme demokratis dan berhasil dengan kebangkitan kembali negara-negara komunis khususnya Rusia sedangkan Liberalisme telah berhasil mengkolaborasi bayangan kekuatan militer dengan kekuatan ekonominya sehingga muncul Neo Liberalisme yang bisa membuat ketergantungan suatu negara serta perubahan sistem dan kebijaksanaan politiknya untuk menyesuaikan dengan aktor subversinya.

d. Kemajemukan bangsa Indonesia memiliki potensi konflik yang senantiasa dapat dimanfaatkan oleh aktor Subversi, melalui dinamika aspek sosial Ketahanan Nasional

e. Eksistensi subversi di Indonesia bergerak dari masa ke masa seolah berimbang dengan dinamika sosial politik Indonesia. Beberapa kali terjadi pemberontakan seperti PKI (1926, 1948 dan 1965), Agresi I dan II, DI/TII, PRRI/Permesta. Secara konstitusi muncul gerakan politik yang berhasil merubah konstitusi menjadi RIS, berkedok gerakan Reformasi. Saat ini bermetamorfosis dalam gerakan kecil yang tersebar baik dalam organisasi sosial politik maupun penciptaan cara pandang dan proses berfikir kaum intelektualnya.

f. Upaya pemerintah untuk membatasi perembesan gerakan subversi telah dilaksanakan baik secara hukum maupun penyadaran belum bisa menjawab substansi ancamannya. upaya penyadaran masyarakat yang beralih kepada pelanggaran kekuasaan telah menimbulkan sikap skeptis masyarakat dan degradasi terhadap pemahaman Ideologi Pancasila itu sendiri. Sehingga dipandang perlu meninjau

kembali substansi kekuatan hukum nasional kita terhadap segala bentuk ancaman yang dapat merusak tatanan dan kedaulatan NKRI.

g. Dengan mempolarisasi setiap indikasi yang kemungkinan dapat merusak nilai ketahanan nasional khususnya pada aspek sosial maka tampak jelas aktifitas subversi yang tetap eksis dalam gerakannya di semua front serta sekaligus memberikan pembuktian bahwa ancaman subversi tidak akan pernah sirna di wilayah NKRI yang kaya dengan sumber energi.

24. Saran.

a. Perlunya di adakan sosialisasi tentang hakekat ancaman subversi yang tidak akan pernah punah serta pentingnya pemahaman Ketahanan Nasional sebagai kekuatan awal untuk membendung perembesan subversi demi suksesnya pembangunan nasional.

b. Menata kembali nilai jati diri bangsa melalui rehabilitasi dan penyegaran terhadap Ideologi Negara "Pancasila" sebagai satu satunya perekat nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

c. Perlu ditinjau kembali TAP MPR No VIII/MPR tahun 1998 tentang pencabutan TAP MPR No II/MPR/1978 tentang P-4 dan perubahan UU No 26 tahun 1999 tentang pencabutan UU Subversi menjadi UU No 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.

d. Perlu segera menyetarakan visi tentang hakekat keamanan nasional untuk dipahami semua elemen bangsa agar mengerti tentang peran dan fungsinya didalam mengamankan dan mempertahankan bangsa dan negara Indonesia dari berbagai bentuk ancamannya.

e. Perlunya segera membuat Rancangan Undang-undang tentang Keamanan Nasional sebagai dasar penaggulangan kegiatan Subversi dan mengoptimalkan penggunaan kekuatan unsur-unsur Hankam.

Bandung, Maret 2008

Komandan Seskoad

Hotma Marbun
Mayor Jenderal TNI